

Acc
Amr
28/4-2023



LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING:

Dra. Teta Riasih, MP

Oleh:

ELIYA PERMATASARI

NRP. 2003060

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL DI KELURAHAN
RANCANUMPANG, KECAMATAN
GEDEBAGE, KOTA BANDUNG

Nama Mahasiswa : Eliya Permatasari

NRP : 2003060

Program : Program Studi Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan

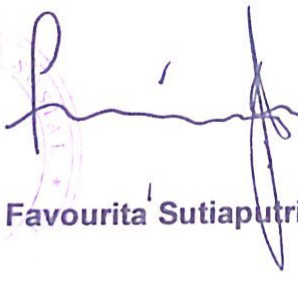
Pembimbing:



Dra. Teta Riasih, MP.

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,**



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah dilaksanakan selama 10 minggu, dimulai pada tanggal 25 Januari 2023 hingga 15 April 2023.

Laporan ini berisi analisis dan rencana intervensi terhadap masalah yang terdapat dalam lima profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, yaitu Profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Praktikan menyadari bahwa laporan ini dapat selesai berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Dra. Teta Riasih, MP dan Eko Gunawan Wibisono, AKS. MP selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada praktikan.
3. Lina Favourita Setiaputri, Ph.D., selaku Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
4. Dra. Atirista Nainggolan, MP., selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
5. Kedua Orang Tua Praktikan yaitu Bapak Otom Zarkoni dan Ibu Darmi Falentina.BA serta Kakak Praktikan Denny Pratama, S.IP yang telah memberikan dukungan kepada Praktikan.
6. Bapak Sapaat, S.Sos., M.AP selaku Lurah Rancanumpang Kecamatan Gedebage atas sambutan, bantuan dan arahnya selama praktikum dilaksanakan.
7. Ibu Ulfa Sari, S.E., AK selaku Sekretaris Kelurahan Rancanumpang atas sambutan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada Praktikan.
8. Perangkat Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage.
9. Rizky Putra Mahardhika atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan selama Praktikan melaksanakan proses praktikum.
10. Sesil, Sindy, Chrisya dan Ayu sahabat Praktikan yang memberikan dukungan moril dan semangat bagi Praktikan dalam melaksanakan praktikum.
11. Teman-teman kelompok 7 Praktikum Laboratorium.

Penulis menyadari adanya kekurangan di dalam Laporan ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik, serta saran guna perbaikan usulan penelitian ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, April 2021

Praktikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	2
1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum	3
1.4 Proses Praktikum.....	4
1.5 Sistematika Laporan	6
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM	7
2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial	7
2.1.1 Gambaran Umum Masalah	7
2.1.2 Tinjauan Konsep.....	8
2.1.3 Asesmen.....	12
2.1.4 Rencana Intervensi	18
2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	27
2.2.1 Gambaran Umum Masalah	27
2.2.2 Tinjauan Konsep.....	28
2.2.3 Asesmen.....	31
2.2.4 Rencana Intervensi	36
2.3 Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	45
2.3.1 Gambaran Umum Masalah	45
2.3.2 Tinjauan Konsep.....	46
2.3.3 Asesmen.....	50
2.3.4 Rencana Intervensi	55
2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	66
2.4.1 Gambaran Umum Masalah	66
2.4.2 Tinjauan Konsep.....	67
2.4.3 Asesmen.....	71

2.4.4 Rencana Intervensi	77
2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana.....	87
2.5.1 Gambaran Umum Masalah	87
2.5.2 Tinjauan Konsep	88
2.5.3 Asesmen.....	91
2.5.4 Rencana Intervensi	97
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
3.1 Kesimpulan.....	107
3.2 Rekomendasi.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bentuk Kegiatan Program Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN	23
Tabel 2.2 Sistem Partisipan pada program Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS	23
Tabel 2.3 Rencana Anggaran Biaya Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS	26
Tabel 2.4 Alat dan Bahan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS	27
Tabel 2.5 Analisis SWOT pada program Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS	28
Tabel 2.6 Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS	30
Tabel 2.7 Penyaluran PIP di Kota Bandung	31
Tabel 2.8 Bentuk Kegiatan Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP	41
Tabel 2.9 Sistem Partisipan Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP	41
Tabel 2.10 Rencana Anggaran Biaya Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP	44
Tabel 2.11 Alat dan Bahan Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP	44
Tabel 2.12 Analisis SWOT pada Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP	45
Tabel 2.13 Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP	47
Tabel 2.14 Data Pengangguran Kelurahan Rancanumpang	48
Tabel 2.15 Bentuk Kegiatan Program Pelatihan Sablon Distro	59
Tabel 2.16 Sistem Partisipan Program Pelatihan Sablon Distro	60
Tabel 2.17 Rencana Anggaran Biaya Program Pelatihan Sablon Distro	62
Tabel 2.18 Alat dan Bahan Pelatihan Sablon Distro	64
Tabel 2.19 Analisis SWOT Program Pelatihan Sablon Distro	65
Tabel 2.20 Jadwal Pelaksanaan Program Pelatihan Sablon Distro	67
Tabel 2.21 Bentuk Kegiatan Program Sosialisasi Fungsi DAS	82
Tabel 2.22 Sistem Partisipan Program Penyuluhan Fungsi Daerah Aliran Sungai	82
Tabel 2.23 Rencana Anggaran Biaya Program Penyuluhan Fungsi Daerah Aliran Sungai	85

Tabel 2.24 Alat dan Bahan Program Penyuluhan Fungsi Daerah Aliran Sungai..	85
Tabel 2.25 Analisis SWOT Program Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.....	86
Tabel 2.26 Jadwal Pelaksanaan Program Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.....	88
Tabel 2.27 Bentuk Kegiatan Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana	100
Tabel 2.28 Sistem Partisipan Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir ..	101
Tabel 2.29 Rencana Anggaran Biaya Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir.....	103
Tabel 2.30 Alat dan Bahan Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir	104
Tabel 2.31 Analisis SWOT Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir.....	105
Tabel 3.32 Jadwal Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembekalan Umum Persiapan Praktikum Laboratorium.....	4
Gambar 1.2 Bimbingan Pra Lapangan oleh Dosen Pembimbing melalui <i>Zoom</i>	4
Gambar 1.3 Serah Terima Praktikan di Kantor Camat Gedebage.....	5
Gambar 1.4 Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial	6
Gambar 1.4 Peningkatan Kompetensi Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.....	6
Gambar 1.5 Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial.....	7
Gambar 1.6 Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	8
Gambar 1.7 Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana	9
Gambar 2.1 Pelaksanaan <i>Community Meeting</i>	16
Gambar 2.2 Pembukaan <i>Community Meeting</i> oleh Praktikan.....	16
Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN.....	19
Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Pemanfaatan Dana PIP	38
Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Tingginya Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang	56
Gambar 2.6 Analisis Pohon Masalah Kapasitas Sungai yang menurun untuk menampung air	77
Gambar 2.7 Analisis Pohon Masalah Minimnya Wawasan & Partisipasi masyarakat tentang kesiapsiagaan banjir	97

DAFTAR LAMPIRAN

Resume Pembekalan	112
Data Lapangan.....	125
Dokumentasi Supervisi/Bimbingan Praktikum Laboratorium.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal.

Politeknik Kesejahteraan Sosial adalah perguruan tinggi dibawah kementerian sosial yang menyelenggarakan Pendidikan Formal yang mencetak Pekerja Sosial Profesional. Proses Pendidikan Pekerja Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan di dalam ruangan (indoor) tetapi juga dilakukan di luar ruangan (outdoor). Proses Belajar di luar ruangan (outdoor) dilaksanakan dengan praktikum. Praktikum Laboratorium adalah praktikum pertama yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa/ praktikan di beberapa wilayah kelurahan di Kota Bandung yang telah ditentukan oleh pihak laboratorium pekerjaan sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Secara spesifik, para praktikan ditempatkan di setiap kelurahan. Salah satu kelurahan yang telah ditentukan tersebut adalah Kelurahan Rancanumpang, yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Gedebage.

Pelaksanaan praktikum Laboratorium ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami antara konsep dengan praktik yang ada di lapangan. Artinya, praktikum ini sebagai bentuk atau perwujudan dari teori yang sudah diciptakan, sehingga mahasiswa lebih memahami realitas yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa menjadi sumbangan yang positif yang dapat mendorong mahasiswa dalam membandingkan sekaligus menggabungkan teori dan konsep yang sudah dipelajari selama proses perkuliahan. Pemahaman akan realitas yang terjadi di lapangan tersebut akan membantu mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dan masyarakat Saat melakukan praktik profesional di lapangan.

Praktikum Laboratorium ini merupakan bentuk perkuliahan di luar kelas yang bertujuan untuk melihat kehidupan masyarakat beserta dinamika yang terjadi di dalamnya. Dinamika tersebut berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan aktual dan terpercaya. Praktikum ini bersifat menemukan fakta di lapangan (fact finding), dengan jelas dan terarah menilai dan memahami kebutuhan dan masalah yang ada di lokasi praktikum. Praktikum ini dilaksanakan untuk melihat dan membandingkan konsep dan teori yang sudah dipelajari dengan kenyataan di lapangan, sehingga diharapkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa semakin bertambah dan peka serta responsive terhadap keadaan sosial yang ada di sekitarnya.

1.2 Tujuan dan manfaat praktikum

1.2.1 Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan Awal
 - b) Asesmen
 - c) Perencanaan Intervensi

1.2.2 Manfaat Praktikum

a. Bagi Mahasiswa

1. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
2. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik
3. praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial

4. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 5. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan- keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 6. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 7. Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan awal
 - b) Asesmen
 - c) Rencana Intervensi
- b. Bagi Lembaga
1. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
 2. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

1.3 Waktu dan lokasi praktikum

Praktikum laboratorium pada semester VI dilaksanakan di Kelurahan Rancanumpang Kota Bandung. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
 - b. Serah Terima Praktikan : 3 Februari 2023
2. Lapangan : 8 Februari – 15 April 2023
3. Pasca Lapangan :
 - a. Bimbingan laporan : 16 April - 26 April 2023
 - b. Pendaftaran ujian : 27 - 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 2 – 3 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

1.4 Proses praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1.4.1 Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

a. Pembekalan Umum

Dilaksanakan dengan pemberian materi tentang pelaksanaan praktikum laboratorium yang disampaikan oleh Ibu Dra. Atirista Nainggolan, MP.



Gambar 1.1 Pembekalan Umum Persiapan Praktikum Laboratorium

b. Bimbingan Pra Lapangan oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan bersama dosen pembimbing merupakan tahap awal dengan pemberian tugas seperti pembuatan rangkuman lima (5) profil dan matriks rencana kegiatan selama 40 hari kedepan.



Gambar 1.2 Bimbingan Pra Lapangan oleh Dosen Pembimbing melalui Zoom

c. Serah Terima Praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum

Serat terima praktikan dilakukan oleh Kaprodi kepada Camat Kecamatan maupun Lurah Kelurahan setempat.



Gambar 1.3 Serah Terima Praktikan di Kantor Camat Gedebage

1.4.2 Tahap pelaksanaan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

A) Analis Jaminan Sosial

Peningkatan Kompetensi dilakukan dengan pembekalan oleh Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, ME yang dilakukan pada 2 Februari 2023 membahas Pengelolaan jaminan sosial yang meliputi:

- a. Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial
- b. Model jaminan sosial yang digunakan
- c. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial



Gambar 1.4 Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial

B) Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Bapak Tonton Heriyanto (CSR Manager PT. AAPC Indonesia) pada Rabu, 22 Februari 2023 dengan materi :

- a. Gambaran Umum Pengelolaan SDBS
- b. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial
- c. Sumber Dana Bantuan
- d. Pengelolaan Sumber Dana



Gambar 1.4 Peningkatan Kompetensi Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

C) Analisis Pemberdayaan Sosial

Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Bapak Samsul Maarif (Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur) pada 8 Maret 2023 dengan materi :

- a. Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Aktor dalam Program Pemberdayaan
- d. Tahapan Pemberdayaan
- e. Penyelenggaraan Pemberdayaan
- f. Peran dan Keterampilan Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan



Gambar 1.5 Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial

D) Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial oleh bapak Ade Reno Sudiarno dari Lutheran World Relief, pada tanggal 24 Maret 2023 dengan materi sebagai berikut :

- a. Gambaran Umum Penataan Lingkungan Sosial (dikaitkan dengan Green Social Work)
- b. Kompetensi yang dibutuhkan untuk praktek penataan Lingkungan sosial
- c. Peluang kerja pada bidang penataan lingkungan sosial



Gambar 1.6 Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial

E) Analisis Penanggulangan Bencana

Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh bapak Mohd Robi Amri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tanggal 5 April 2023 dengan materi sebagai berikut:

- a. Gambaran Umum Kondisi Kebencanaan di Indonesia
- b. Peran Masyarakat dan Para Pihak dalam upaya Antisipasi Bencana
- c. Kegiatan dan Tantangan Penanggulangan Bencana
- d. Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa
- e. Gambaran Peran dalam Upaya Penanggulangan Bencana



Gambar 1.7 Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana

1.4.3 Tahap Pengakhiran

1. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
2. Pada tanggal 22 April 2021 dilaksanakan pembimbingan dengan kegiatan bimbingan penulisan laporan akhir sekaligus menjadi bimbingan terakhir.
3. Ujian Lisan Praktikum
4. Perbaikan dan penyerahan laporan

1.5 Sistematika laporan

BAB I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang; tujuan dan manfaat praktikum; proses praktikum; dan sistematika laporan.

BAB II : PRAKTIKUM LABORATORIUM, memuat gambaran umum masalah; tinjauan konsep/teori; asesmen; dan rencana intervensi setiap profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaansosial.

BAB III : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial

PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TERKAIT PBI-JKN MELALUI SOSIALISASI MEKANISME PENDAFTARAN PBI-JKN TERINTEGRASI DENGAN DTKS DI KELURAHAN RANCANUMPANG

2.1.1 Gambaran Umum Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya sistem jaminan yang melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat menjadi JKN adalah Program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Jaminan Kesehatan Nasional menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Kesehatan anggota keluarga menjadi salah satu faktor kunci terwujudnya Kesejahteraan di suatu Negara. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Program Jaminan Kesehatan Nasional menysasar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan dua skema yaitu Skema Non-Penerima Bantuan Iuran (*Contributory*) dan Skema Penerima Bantuan Iuran (*Non-Contributory*).

Berdasarkan data tahun 2020, total Jumlah Penerima Bantuan Iuran APBN di Kota Bandung adalah 352.281 orang (opendata.jabarprov.go.id). Jumlah Penerima ini terbilang cukup besar tetapi tidak disertai dengan pemahaman masyarakat terkait mekanisme Pendaftaran PBI-JKN. Kelurahan Rancanumpang merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Di Kelurahan Rancanumpang ini Skema PBI-JKN (Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional) masih belum dikenal sehingga PBI-JKN (Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional) masih kurang pemahaman tentang mekanisme pendaftaran PBI-JKN (Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional) yang terhubung dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Sosialisasi mengenai PBI-JKN masih sangat kurang baik dilihat dari masyarakat yang tidak memahami mekanisme menjadi penerima manfaat PBI-JKN. Masyarakat memiliki anggapan bahwa setelah mendaftarkan diri di Kelurahan maka otomatis akan mendapatkan PBI-JKN. Padahal hal ini

memerlukan waktu yang cukup Panjang hingga dapat diverifikasi dan validasi bahwa orang tersebut layak mendapatkan PBI-JKN. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya pihak terkait yang melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam hal ini adalah Kader JKN.

2.1.2 Tinjauan Konsep

a) Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 3) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- 4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- 5) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- 6) Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

b) Kesejahteraan Sosial

Siporin (1975) dalam Sukoco (1995) mengatakan bahwa Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. Kesejahteraan Sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat (Zastrow, 2000). Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Adapun indikator yang mempengaruhi kesejahteraan yang diukur menurut BPS terdiri dari 1) Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, 2) Keadaan tempat tinggal, 3) Fasilitas tempat tinggal, 4) Kesehatan anggota keluarga, 5) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, 6) Kemudahan memasukkan anak kepada jenjang pendidikan, 7) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (Sugoharto, 2006).

Menurut pasal nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c) Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat 4, jaminan sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Jaminan sosial menurut ILO (International Labour Organization) adalah jaminan sosial (social security) secara luas adalah social security pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Secara sederhana jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. Dalam kajian umum yang didasarkan pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, telah membangun komitmen bersama atas hak hidup, pendidikan, dan kesejahteraan, serta Kesehatan.

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia ini memiliki tujuan, diantaranya adalah :

- a) Untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan cacat mental,

eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- b) Untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

d) Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)

Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak (Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.) bagi kehidupan diri dan/ atau keluarga.

1) Syarat PBI-JKN

PBI adalah kelompok masyarakat miskin dan orang tidak mampu yang kriterianya mengacu pada keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdapat kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 146 Tahun 2013.

Kategori fakir miskin dan orang tidak mampu:

- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar.
- b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar.
Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar terdapat di dalam lembaga kesejahteraan sosial maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial yang terdiri atas:
 - (1) Gelandangan
 - (2) Pengemis
 - (3) Perseorangan dari komunitas adat terpencil
 - (4) Perempuan rawan sosial ekonomi
 - (5) Korban tindak kekerasan
 - (6) Pekerja migran bermasalah sosial
 - (7) Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat
 - (8) Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial
 - (9) Penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan
 - (10) Penderita thalassemia mayor
 - (11) Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
 - (12) Peserta program keluarga harapan menggunakan kartu keluarga harapan
 - (13) Penerima bantuan langsung sementara masyarakat

(14) Perseorangan penerima program beras miskin

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada Pasal 5 Ayat (1) syarat PBI-JKN antara lain:

- (1) Penduduk warga negara Indonesia;
- (2) Memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil
- (3) Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

2) Alur Pendaftaran PBI-JKN

Pendaftaran PBI tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi melalui proses verifikasi, validasi, dan penetapan sasaran menjadi PBI sebagaimana telah diatur oleh Kementerian Sosial RI. Informasi selanjutnya dapat menghubungi Dinas Sosial kab/kota. Di tingkat daerah, pendaftaran penduduk PBI APBD diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing. Pada umumnya, penduduk yang didaftarkan oleh Pemda adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas atau PBI APBN.

Yang menentukan PBI adalah tim dari Dinas Sosial. Mereka akan mendata siapa saja yang masuk dalam kategori miskin. Data tersebut disampaikan pada Dinas Kesehatan dan didaftarkan sebagai peserta PBI. Dan menjadi peserta PBI dengan sumber pendanaan APBN. Sedangkan bagi PBI sumber Dana APBD, cukup dengan mengajukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) ke puskesmas kecamatan atau kelurahan dan bersedia ditempatkan dengan fasilitas kelas 3 bagi warga. Kemudian dilakukan verifikasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Sebelum melakukan verifikasi PBI pengganti. Hasil verifikasi dikirim ke pusat basis data terpadu untuk memperbaharui Basis Data PBI. Kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Pendaftaran PBI tidak melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sehingga silakan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten / Kota setempat untuk informasi lebih lanjut tentang PBI. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bahwa data Penerima Bantuan Iuran (PBI) setiap 6 bulan akan dilakukan validasi oleh Kementerian Sosial.

2.1.3 Asesmen

a) Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah terkait dengan Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS adalah sebagai berikut :

- 1) Pemahaman masyarakat terkait pendaftaran PBI-JKN yang kurang maksimal

Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat yang kurang diakibatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki rasa ingin tahu tentang Program PBI-JKN. Sehingga Masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan PBI-JKN serta alur dan mekanisme PBI-JKN. Selain dari sisi masyarakat ditemukan bahwa Pemerintah cenderung tidak memberikan informasi secara jelas dan gamblang tentang Program PBI-JKN serta bagaimana penentuan penerima manfaat dari PBI-JKN. Oleh karena itu, sosialisasi dari pemerintah dan pihak terkait sangat diperlukan guna menambah pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat tentang mekanisme pendaftaran PBI-JKN.

- 2) Kelurahan Rancanumpang tidak Memiliki Kader JKN

Kader JKN adalah mitra yang direkrut oleh BPJS Kesehatan dengan tugas khusus antara lain memberikan sosialisasi, pendaftaran, perubahan data, dan penagihan iuran kepada peserta JKN. Dalam hal ini, Kader JKN bertanggungjawab dalam memberikan pengetahuan tentang informasi Jaminan Kesehatan Nasional baik bagi Penerima Bantuan Iuran maupun Bukan Penerima Bantuan Iuran.

Tetapi Kelurahan Rancanumpang tidak memiliki Kader JKN untuk mensosialisasikan serta memberitahu informasi mengenai JKN sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui alur atau mekanisme Pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran dan Bukan Penerima Bantuan Iuran. Alur Pendaftaran PBI-JKN memerlukan waktu yang cukup lama karena terintegrasi dengan DTKS. Padahal Pendaftaran DTKS memerlukan waktu yang cukup Panjang dan memiliki syarat tertentu agar terdaftar menjadi DTKS.



Gambar 2.1 Pelaksanaan *Community Meeting*



Gambar 2.2 Pembukaan *Community Meeting* oleh Praktikan

Berdasarkan hasil dari *Community Meeting* ditemukan bahwa sejumlah masyarakat menginginkan menjadi Penerima Bantuan Iuran JKN tetapi tidak mengetahui bahwa PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS sehingga diperlukan waktu untuk verifikasi dan validasi data berkaitan dengan pendaftar. Masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman bahwa PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS sehingga penerima manfaat dari PBI-JKN adalah masyarakat yang tergolong 40% masyarakat miskin di Indonesia yang termasuk didalam DTKS.

- 3) Kurangnya Sinergitas antara Kelurahan dan Lembaga terkait dalam pelaksanaan PBI-JKN

Sinergi dari Pemerintah Kelurahan dan Pihak lainnya seperti Karang Taruna, Dinas Kesehatan (Puskesmas), dan BPJS dirasa kurang dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait PBI-JKN. Di Kelurahan Rancanumpang kurang adanya koordinasi antara Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan dengan Pihak Pemerintah Kelurahan. Puskesmas dirasa kurang terbuka terkait data-data PBI-JKN di Kelurahan Rancanumpang. Pihak Kelurahan menilai bahwa pihak Puskesmas sulit dijangkau terkait koordinasi data PBI-JKN.

- 4) Kurangnya Pengawasan Pendaftaran PBI-JKN oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat dan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab jalannya berbagai bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dinilai kurang terkait Tindakan pengawasan terhadap masyarakat yang memiliki keinginan mendaftar sebagai penerima PBI-JKN. Selain itu, Belum ada tindakan pengawasan

yang lebih mendalam lagi terkait mekanisme pelaksanaan Program PBI-JKN di lapangan.

1) Penyebab masalah

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh praktikan, berikut merupakan beberapa penyebab yang ditimbulkan dari adanya masalah terkait Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN di Kelurahan Rancanumpang:

(1) Media Sosialisasi PBI-JKN kepada masyarakat masih kurang

Pemberian jaminan sosial kesehatan Penerima Bantuan Iuran bagi warga yang tidak mampu bagi aparat dan tokoh masyarakat di Kelurahan Rancanumpang. Sosialisasi dilaksanakan dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang program pemerintah JKN. Seringkali warga yang sudah sakit harus mendapat perawatan *opname* di Rumah Sakit belum mempunyai JKN. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi kepada Lurah, RW, RT dan tokoh masyarakat tentang kriteria warga yang berhak menerima Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya ditanggung Pemerintah atau biasa disebut JKN PBI.

(2) Masyarakat terlalu bergantung pada Pemerintah

Perilaku dan Sikap Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk mencari informasi terkait PBI-JKN secara mandiri. Masyarakat juga selalu menunggu informasi disampaikan oleh Pemerintah tentang PBI-JKN. Sikap Masyarakat yang menunggu dan bergantung pada pemerintah akan menyebabkan pemahaman dari masyarakat yang tidak maksimal dan juga akan menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah serta penyelenggara jaminan sosial.

(3) Belum adanya Upaya Pendorong untuk menyebarluaskan informasi terkait JKN

Upaya Pendorong penyebarluasan Informasi menjadi satu hal penting dalam meningkatkan pengetahuan dari masyarakat. Informasi yang diberikan juga harus berupa fakta konkrit dan dijelaskan secara singkat, padat dan lugas sehingga dapat dipahami secara cepat oleh masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak terjadi di Kelurahan Rancanumpang baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas terkait dan badan penyelenggara jaminan sosial. Hal ini lah yang menimbulkan kesalahan informasi sehingga masyarakat tetap pada perspektifnya yaitu PBI-JKN dapat diakses oleh siapa saja tanpa kriteria tertentu.

2) Dampak Masalah

Dampak dari masalah terkait Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak Terwujudnya Jaminan Sosial bagi Masyarakat di Kelurahan Rancanumpang.

Jaminan Sosial sebagai bagian dari perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tidak *tercover* oleh PBI-JKN padahal layak dan masuk dalam kriteria penerima akan menjadi tidak terjamin sebagai akibat dari banyaknya masyarakat yang mampu tetapi ingin mendaftar PBI-JKN. Padahal Jaminan Sosial terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin akan sangat dibutuhkan dan perlu dioptimalkan setiap tahunnya. Akan tetapi Ketika terjadi masalah tersebut maka akan menyebabkan sulitnya pengoptimalan Jaminan Sosial Kesehatan bagi masyarakat miskin.

- (2) Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Petugas Pendaftaran PBI-JKN Menurun.

Timbulnya stigma ataupun anggapan bahwa Petugas yang mendaftarkan PBI-JKN hanya berpihak pada yang mampu menjadi dampak dari masalah ini. Masyarakat miskin yang memiliki stigma seperti ini terhadap petugas dikarenakan mereka yang sebenarnya layak mendapatkan malah tidak mendapatkan bantuan. Padahal hal ini tidak terjadi seperti stigma. Petugas memiliki kewajiban dalam mendaftarkan tetapi tidak memiliki hak dalam penentuan penerima. Hal ini tidak dipahami oleh masyarakat sehingga banyak timbul permasalahan kesalahpahaman diantara masyarakat.

- (3) Menimbulkan Perasaan Iri dari Masyarakat

Dikarenakan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan bantuan maka akan berdampak pada adanya rasa iri yang timbul diantara masyarakat. Hal ini dapat dilakukan penanganan melalui pemberian pemahaman sehingga mengurangi rasa iri dan pemicu konflik antar masyarakat.

- (4) Petugas kurang maksimal dalam menjalankan tugas pendaftaran PBI-JKN

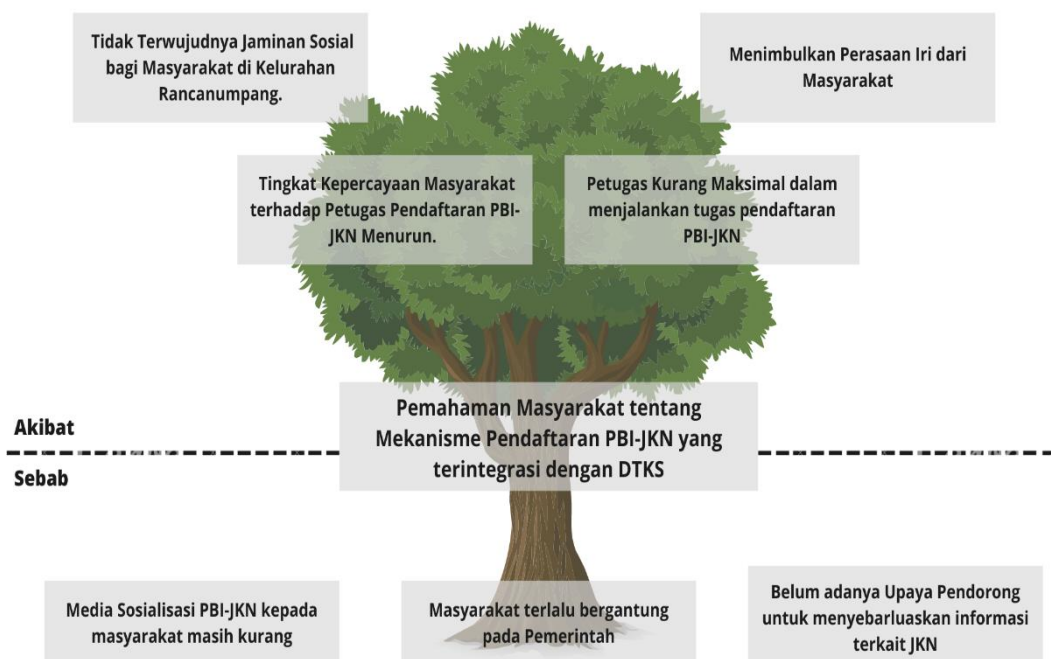
Stigma yang muncul dari masyarakat bahwa petugas tidak memihak masyarakat miskin menjadi tekanan bagi petugas Ketika menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Tekanan inilah yang menyebabkan kurang maksimalnya petugas dalam menjalankan tugas pendaftaran PBI-JKN.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka berdasarkan tingkat kemendesakkannya dan luasnya dampak yang dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan dari Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS adalah Kurangnya Sosialisasi dari Pihak Pemerintah terkait dengan Penerima Manfaat PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS.

4) Analisis Pohon Masalah

Analisis Pohon masalah merupakan suatu alat atau teknik pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa faktor yang saling terkait. Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari masalah Kurangnya Sosialisasi dari Pihak Pemerintah terkait dengan Penerima Manfaat PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS.



Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN

b) Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS kepada masyarakat Kelurahan Rancanumpang.

Sosialisasi dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Mekanisme Pendaftaran dan Kriteria Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Ketika Sosialisasi tidak dilakukan maka akan berdampak lebih lanjut pada penurunan Kualitas dan tingkat Keberhasilan dari Program PBI-JKN. Hal ini dikarenakan Tingkat Keberhasilan suatu program terkhusus pada program yang bersifat bantuan dilihat dari pencapaian tujuan dari program tersebut.

- (2) Peningkatan Kualitas Pegawai/Petugas/Staff Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Rancanumpang.

Kualitas Pegawai, petugas ataupun Staff Kasi Kesejahteraan Sosial akan terus ditingkatkan agar dapat memiliki kompetensi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa Penerima Bantuan Iuran JKN memiliki kriteria khusus sehingga tidak semua orang mendapatkan bantuan tersebut.

- (3) Peningkatan Kemampuan Koordinasi antara para *Stakeholder* terkait data PBI-JKN

Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien. Dari pengertiannya pun dapat diketahui bahwa koordinasi antara *stakeholder* seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kelurahan dan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tk.I akan sangat diperlukan guna pengoptimalisasian Program PBI-JKN.

c) Identifikasi Potensi Sumber

Berikut merupakan penjelasan tentang identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian permasalahan terkait dengan Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Sosial

Dinas Sosial berperan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait mekanisme pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS. Dinas Sosial secara umum juga memberikan pengawasan

terhadap pendaftaran dan kinerja dari petugas yang mengelola dan melaksanakan pendataan PBI-JKN yang diintegrasikan dengan DTKS.

(2) Pemerintah Kelurahan Rancanumpang

Staff Kasi Kesejahteraan Sosial memiliki peran dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait data DTKS. Staff Kasi Kesejahteraan Sosial juga berperan dalam pengoptimalan kinerja pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS.

(3) Aparat RW dan RT

Ketua RT dan Ketua RW dihormati oleh masyarakat yang kurang memiliki pemahaman terkait PBI-JKN sehingga Ketua dan Aparat RT dan RW dapat diajak bekerja sama dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat terutama tentang Kriteria khusus penerima bantuan iuran.

(4) Masyarakat Kelurahan Rancanumpang

Masyarakat yang sudah memiliki pemahaman dapat diajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memaksimalkan program penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional.

2.1.4 Rencana Intervensi

a) Latar Belakang

Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional harus menjadi program yang dapat menjadi bantuan masyarakat miskin dalam mendapat jaminan kesehatan. PBI-JKN merupakan komponen yang sangat penting dalam pengentasan rantai kemiskinan dan mencapai tujuan negara yaitu Kesejahteraan masyarakatnya. PBI-JKN dijalankan dengan prinsip asuransi dan berbentuk premi tetapi premi dibayarkan oleh Pemerintah. PBI-JKN sama seperti sistem bantuan sosial lainnya yaitu diberikan secara selektif dan sesuai dengan kondisi riil keluarga tersebut.

Di Kelurahan Rancanumpang terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terkait mekanisme pendaftaran PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa ketika sudah menyampaikan keinginan kepada petugas kesos kelurahan bahwa ingin menjadi Penerima Manfaat PBI-JKN maka akan langsung menjadi Penerima Manfaat diwaktu dekat. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui kriteria PBI-JKN sehingga muncul berbagai stigma yang kurang sesuai dengan kenyataan riil di lapangan. Hal inilah yang menjadi masalah terkait dengan pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat yang kurang optimal akan menyebabkan berbagai permasalahan terutama dengan kesalahpahaman antara masyarakat, petugas, pemerintah dan badan penyelenggara jaminan kesehatan. Oleh karena itu, praktikan merencanakan

intervensi dalam rangka membantu penyelesaian masalah terkait pemahaman masyarakat tentang mekanisme pendaftaran dan kriteria PBI-JKN untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami mekanisme dan kriteria khusus PBI-JKN sesuai dengan kebijakan melalui kegiatan **“Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang”**.

b) Tujuan umum dan khusus

(1) Tujuan Umum

Tujuan diadakannya **“Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang”** adalah Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN.

(2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari program **“Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang”** adalah:

1. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memahami langkah-langkah pendaftaran PBI-JKN
2. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang dapat mengetahui kriteria penerima bantuan iuran
3. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi
4. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang tidak memiliki stigma negatif terhadap seseorang dan lembaga terkait

c) Bentuk Kegiatan dan Program

Program dan Kegiatan terkait dengan **“Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang”** dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi terkait Tata Cara atau Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN dan Jenis dan Kriteria Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Staff Kesos bekerja sama dengan Dinas Sosial. Bentuk Kegiatan dan Program dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Bentuk Kegiatan Program Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Sosialisasi terkait Tata Cara atau Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN & Kriteria Penerima Bantuan Iuran	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN	Staff Kasi Kessos	Lurah	1 hari	Kelurahan Rancanumpang

d) Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam program Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang PBI-JKN. Sistem partisipan terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam program Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang PBI-JKN, telah ditentukan sistem partisipan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Sistem Partisipan pada program Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i> Pihak yang mengkoordinasikan perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial
2	<i>Change Agent System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan atau pemecahan masalah	Pekerja Sosial
3	<i>Client System</i> Penerima manfaat primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Kelurahan Rancanumpang • Petugas/Pegawai/Staff Kesos Kelurahan Rancanumpang
4	<i>Support System</i> Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan atau bantuan dalam rangka penyelesaian masalah	Dinas Sosial
5	<i>Controlling System</i> Seseorang/lembaga yang berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menyetujui adanya perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	Dinas Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
6	<i>Implementing System</i> Staff atau <i>voullenteer</i> yang bertugas untuk melaksanakan intervensi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Petugas/Pegawai/Staff Kesos Kelurahan Rancanumpang
7	<i>Target System</i> Pihak yang harus diubah agar tujuan intervensi masyarakat dapat tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Kelurahan Rancanumpang • Petugas/Pegawai/Staff Kesos Kelurahan Rancanumpang
8	<i>Action System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

e) Metode dan Teknik

(1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah “*community organization dan community development*”, Metode pekerjaan sosial ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Tujuan dari metode *Community Organization* ini sangat relevan dengan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan Pemahaman Masyarakat. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar masyarakat dapat mengetahui dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme pendaftaran dan Kriteria PBI-JKN yang terintegrasi dengan DTKS.

(2) Teknik

Teknik pekerjaan sosial merupakan sekumpulan gagasan yang sengaja dibuat untuk membantu pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial kepada klien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teknik yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi

Berarti suatu kerjasama yang erat antara sistem sasaran dan sistem kegiatan. Sudah ada kesepakatan antara sistem kegiatan dengan sistem sasaran tentang perlunya upaya perubahan. Selain itu, dukungan sumber cukup terjamin. Kolaborasi yaitu suatu strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan jika kelompok sasaran / komunitas sasaran sudah memahami apa yang akan dan harus dilakukan. Selain itu,

komunitas sasaran sudah memiliki kehendak atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Melalui strategi ini, komunitas maupun stakeholders lainnya diajak untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan serta pemberdayaan masyarakat.

2. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan penerima manfaat yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam Peningkatan pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan kriteria PBI-JKN. Teknik ini digunakan dalam tahap pasca kegiatan untuk mendukung masyarakat yang telah diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diberikan.

f) Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang dimana untuk merealisasikan program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang.

Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2.3 Rencana Anggaran Biaya Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS

No	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Persiapan	ATK	5 paket	Rp.7.000	Rp.39.600
		Kertas plano	5 lembar	Rp.650	Rp. 3.250
		Hvs	1 rim	Rp. 40.000	Rp.40.000
		Snack	15 box	Rp. 5.000	Rp. 75.000
		Jumlah			
2.	Pelaksanaan	ATK	25 paket	Rp. 6.000	Rp. 150.000
		Modul	25 eksemplar	Rp. 15.000	Rp. 375.000
		Kertas plano	10 lembar	Rp. 650	Rp. 6.500
		HVS	1 rim	RP. 40.000	Rp. 40.000
		Spanduk	2 lembar	Rp. 40.000	Rp. 80.000
		Snack peserta	2 kali x 20 box	Rp. 5.000	Rp. 200.000
		Snack panitia	2 kali x 10 box	Rp. 500.000	Rp. 100.000
		Snack pemateri	5 box	Rp. 7.000	Rp. 35.000
		Proyektor	1 buah	Rp. 300.000	Rp. 300.000
		Honor pemateri	5 orang	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca pelaksanaan	ATK	5 paket	Rp.6.000	Rp. 30.000
		Bahan computer	1 paket	Rp. 175.000	Rp. 175.000
		Kertas plano	5 lembar	Rp. 650	Rp. 3.250
		Snack	10 box	Rp. 7.000	Rp. 70.000
		Jumlah			
4.	Dana darurat				Rp.200.000
Jumlah					Rp. 2.922.600

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan progam. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang.

Tabel 2.4 Alat dan Bahan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS

DAFTAR PERALATAN	DAFTAR BAHAN
komputer / laptop	Kertas plano
Proyektor	Kertas HVS
Mikrofon	Alat tulis
Speaker	Taplak meja
Meja	Tinta printer
Kursi	
Printer	

g) Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat factor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan factor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT praktikan gunakan untuk menguji kelayakan Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang. Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh alternative ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif *defensive* dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Analisis SWOT dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Analisis SWOT pada program Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS

	<p>Kekuatan(S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia Sumber Daya Pelaksana yaitu Pekerja Sosial, Staff Kesejahteraan Sosial Kelurahan yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan program 2) Adanya Komitmen Peningkatan Pemahaman masyarakat yang tinggi dari Panitia 3) Memiliki materi yang dibutuhkan dan sesuai substansi masalah 	<p>Kelemahan(W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya Stigma buruk Masyarakat terhadap pemerintah dan badan penyelenggara 2) Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap program
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan dari Tokoh Masyarakat, aparat RT&RW serta masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih terkait PBI-JKN 2) Tersedianya Narasumber yang akan menyajikan materi 3) Tersedianya media untuk menyebarkan informasi secara luas. 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Koordinasi Panitia dengan Stakeholder yang mendukung kegiatan 2) Memaksimalkan substansi materi yang dimiliki dengan menggabungkan materi dari milik pemerintah dengan narasumber lain 	<p>Strategi WO</p> <p>Meningkatkan motivasi dan kepercayaan masyarakat tentang mekanisme dan kriteria PBI-JKN melalui pendampingan sosial oleh stakeholder terkait</p>
<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya Sumber Dana Penyelenggaraan Program Sosialisasi 2) Materi Sosialisasi tidak diterapkan oleh masyarakat 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan contoh dan demonstrasi yang mudah dipahami oleh sasaran 2) Memaksimalkan dana yang diperoleh dari stakeholder 	<p>Strategi WT</p> <p>Menyebarkan pamphlet agar masyarakat membaca Kembali materi sosialisasi</p>

h) Jadwal dan Langkah-langkah

1) Langkah-Langkah

Berikut adalah Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang:

a. Pra Sosialisasi

Tahap Pra Kegiatan dilakukan selama 1 hari untuk mempersiapkan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk Tim Kerja
- b) Mendata Sasaran
- c) Menghubungi Narasumber
- d) Merancang Materi
- e) Menentukan Lokasi
- f) Menyebarkan Undangan dan Poster

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari, berlokasi di Aula Kelurahan Rancanumpang. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan sosialisasi:

- a) Pemaparan Materi
- b) Games
- c) Diskusi
- d) Penutup

c. Pasca Sosialisasi

Tahap pasca sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- a) Evaluasi Kegiatan
- b) Menyusun Laporan Kegiatan

2) Jadwal Kegiatan

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait PBI-JKN Melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang. Kegiatan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.45 WIB.

Tabel 2.6 Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	09.00 – 09.20	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Kepala Dinas Sosial
2.	09.20 – 10.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN terintegrasi dengan DTKS	Staff Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Rancanumpang
3.	10.00-10.15	Ice breaking	Sie. Acara	Games	Sie. Acara
4.	10.15-11.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Kriteria Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Staff Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Rancanumpang
5.	11.00 – 11.35	Diskusi	Sie. Acara	Tanya jawab	Staff Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Rancanumpang
6.	11.35 – 11.45	Penutupan	Sie. Acara	Foto bersama	-

2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

PENINGKATAN PEMAHAMAN ORANG TUA PENERIMA MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI SOSIALISASI PEMANFAATAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR

2.2.1 Gambaran Umum Masalah

Pendidikan merupakan salah satu penunjang terwujudnya Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Pendidikan menjadi faktor yang dapat memutus rantai kemiskinan. Hal ini bermaksud bahwa Masyarakat yang mempunyai Pendidikan akan memiliki pengetahuan yang lebih dan dapat mencari pekerjaan yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal. Hal ini akan berdampak untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang kesulitan dalam memenuhinya. Oleh karena itu, adanya program penunjang atau bantuan dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Anak usia sekolah di dalam keluarga miskin harus didukung oleh pemerintah dengan pemberian akses dan Peningkatan kualitas belajar. Hal ini sudah berjalan tetapi ditemukan bahwa keluarga penerima manfaat tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan bantuan berupa uang dari Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar sebagai salah satu Program bantuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dimana Kementerian Sosial berperan dalam pendataan masyarakat atau keluarga yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Selain itu Kementerian Sosial berperan dalam penyediaan dokumen seperti Kartu Keluarga Sejahtera maupun Surat Keterangan Miskin sebagai salah satu syarat menerima PIP.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Penyaluran PIP di Kota Bandung

Jenjang	Disalurkan	Pemberian
SD (SISWA)	79.067	44.998
SD (Rp)	32.805.000.000	18.683.100.000
SMP (SISWA)	44.219	30.282
SMP (Rp)	27.849.750.000	18.402.000.000
SMA (SISWA)	13.363	6.281
SMA (Rp)	11.768.500.000	5.157.500.000
SMK (SISWA)	23.328	11.289
SMK (Rp)	19.434.500.000	9.055.500.000

Selanjutnya Kelurahan Rancanumpang sebagai salah satu Kelurahan di Kota Bandung sudah menjalankan Program Indonesia Pintar dengan jumlah penerima sebesar 29 orang. Kemudian yang diusulkan oleh sekolah untuk menerima bantuan PIP adalah sebesar 229 dari total 232 siswa. Hal ini menjadi

sorotan karena sejumlah 98% siswa didaftarkan menjadi penerima bantuan. Hal pokok yang harus dicari alternatif solusinya adalah bagaimana pelaksanaan PIP dapat mewujudkan pemerataan pendidikan terkhusus di kelurahan Rancanumpang. Berbagai permasalahan yang terjadi memerlukan solusi dalam mengatasinya.

2.2.2 Tinjauan Konsep

a) Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

b) Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa

yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemberian bantuan kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak yang rawan putus agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa diluar biaya operasional sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.

c) Kriteria penerima progam Indonesia pintar

Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) melalui Kartu Indonesia Pintar sebagai berikut:

PIP Dikdasmen diberikan kepada anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

- 1) Peserta Didik pemegang KIP;
- 2) Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
- 3) Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
- 4) Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
- 5) Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
- 6) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
- 7) Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah; atau
- 8) Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah.

d) Penyaluran Dana PIP

PIP yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah banyak membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Pencairan dana KIP kini lebih mudah dilakukan. Sekarang ini, KIP berupa kartu yang dapat digunakan pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan setiap penerima program ini mendapat buku tabungan. Tahun ini, Program Indonesia Pintar (PIP) telah dilaksanakan pemerintah selama lima tahun

sejak diluncurkan pertama kali pada 3 November 2014. Selain meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, program prioritas pemerintah ini juga bertujuan untuk mencegah siswa yang rentan putus sekolah dan menarik anak putus sekolah untuk bersekolah serta meringankan biaya personal Pendidikan.

- 1) Dana PIP Dikdasmen disalurkan langsung kepada Peserta Didik melalui rekening SimPel di bank penyalur.
- 2) Penyaluran dana PIP dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - i Puslapdik melakukan perjanjian kerja sama dengan bank penyalur
 - ii Puslapdik membuka rekening penyalur untuk keperluan menyalurkan dana PIP Dikdasmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - iii Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima PIP Dikdasmen kepada bank penyalur untuk dibuatkan rekening SimPel atas nama Peserta Didik penerima PIP Dikdasmen
 - iv Puslapdik menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan surat keputusan penetapan Peserta Didik penerima PIP Dikdasmen kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - v KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama Puslapdik di bank penyalur
 - vi Puslapdik menyampaikan Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) kepada bank penyalur untuk menyalurkan/ memindah buku kan dana dari rekening penyalur ke reke penerima PIP Dikdasmen
 - vii Bank penyalur melakukan penyaluran dana ke rekening SimPel penerima PIP Dikdasmen dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerjasama antara bank penyalur dan Puslapdik
 - viii Bank penyalur melaporkan perkembangan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada Puslapdik

e) Pemanfaatan Dana PIP

Pemanfaatan berdasarkan pengertian masing-masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu dalam hal ini pemanfaatan terhadap efektivitas penggunaan alokasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap kegiatan pembiayaan dalam proses pembelajaran selama menempuh pendidikan. Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- i membeli buku dan alat tulis
- ii membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- iii membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
- iv uang saku peserta didik
- v biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal
- vi biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

2.2.3 Asesmen

a) Identifikasi Masalah

- 1) Dana PIP dipakai untuk memenuhi kebutuhan selain Pendidikan

Ternyata, masih ada yang mengambil dana dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya yakni dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ditemukan bahwa masih ada anak yang menggunakan dana bantuan untuk jalan-jalan dengan teman sebaya. Padahal agar dampak dari suatu program dapat dirasakan oleh kelompok sasaran ialah dengan memanfaatkan sesuai peruntukannya. Banyak orang tua yang tidak paham terkait pemanfaatan bantuan sehingga tidak sedikit yang menggunakannya untuk keperluan sehari-hari atau bahkan untuk keperluan pribadi orang tua.

- 2) Pemahaman Masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Dana PIP

Pemanfaatan dana PIP sudah diatur didalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Di dalam Peraturan ini terdapat pemanfaatan dana PIP yang sesuai dengan tujuan program. Hal ini perlu diberitahukan kepada penerima manfaat agar penerima manfaat dapat menyesuaikan pemanfaatan dana PIP tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak, perilaku konsumtif orang tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran bantuan, dan manajemen keuangan yang buruk.

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh praktikan, berikut merupakan beberapa penyebab yang ditimbulkan dari adanya masalah terkait Pemahaman Masyarakat tentang Pemanfaatan Dana PIP di Kelurahan Rancanumpang yaitu:

(1) Kurang Optimalnya akses informasi Pemanfaatan Dana PIP

Sosialisasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat terkait alokasi Dana PIP sebagaimana mestinya. Dengan kurangnya sosialisasi maka dapat dilihat masyarakat penerima manfaat tidak tahu peruntukan dana PIP. Pentingnya secara sistematis dan konsisten peran sekolah melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat tujuan PIP yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

(2) Penerima Manfaat memiliki kebutuhan mendesak selain Pendidikan

Penerima Manfaat tergolong dalam kategori keluarga miskin dan memiliki kebutuhan mendesak lainnya selain Pendidikan seperti pemenuhan kebutuhan pokok. Kebutuhan Pokok yang belum terpenuhi menyebabkan mereka memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada memanfaatkan dana PIP sesuai dengan tujuan program.

(3) Kurangnya Pengawasan terkait pemanfaatan dana PIP oleh penerima manfaat

Pengawasan Pemanfaatan dana PIP tidak dilaksanakan secara optimal di Kelurahan Rancanumpang dilihat dari pemanfaatan dana yang masih dinilai kurang tepat. Pengawasan dapat dilakukan oleh stakeholder seperti sekolah sebagai pelaksana program maupun pihak kelurahan sebagai pengawas dalam hal pelaksanaan di lapangan dan kesesuaian data PIP dan Fakta lapangan terkait keadaan keluarga penerima manfaat. Terkait sanksi belum pernah memberikan sanksi apapun hanya berupa teguran. Karena belum pernah di temukan pelanggaran dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar yang berat, sikap pelaksana dalam hal ini pihak Sekolah maupun Dinas terkait tidak sepenuhnya memahami apa sanksi yang akan didapat apabila terjadi pelanggaran.

2) Dampak Masalah

Dampak dari masalah terkait Pemahaman Masyarakat tentang Pemanfaatan Dana PIP di Kelurahan Rancanumpang, yaitu:

(1) Tidak terpenuhinya manfaat Pendidikan bagi penerima manfaat

Manfaat penunjang Pendidikan penerima manfaat tidak akan terpenuhi jika tidak melakukan pemanfaatan dana Kebutuhan Pendidikan seperti buku dan alat tulis, seragam sekolah dan lain-lain akan sulit terpenuhi. Manfaat

Pendidikan sebagai bentuk manfaat dari program menjadi tidak tercapai menjadi hal yang akan disoroti karena berdampak pada keberhasilan program secara menyeluruh.

(2) Meningkatnya angka putus sekolah

Pemanfaatan dana PIP yang kurang tepat dapat juga menyebabkan penerima manfaat menjadi putus sekolah karena dana yang seharusnya digunakan sebagai penunjang Pendidikan tidak dialokasikan untuk Pendidikan melainkan sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan lainnya. Ketika Pemanfaatan Dana PIP tidak dijalankan sesuai ketentuan maka kondisi Pendidikan dan kesejahteraan penerima manfaat pun akan menurun karena Pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

(3) Program Indonesia Pintar berjalan tidak sesuai dengan tujuan program

Sebagaimana maksud dari tujuan adalah sebagai tolak ukur yang harus dicapai oleh sebuah program. Oleh karena itu, Tujuan program merupakan salah satu hal penting dalam melihat dan mengidentifikasi keberhasilan program. Tujuan Program Indonesia Pintar secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan personal Pendidikan dari penerima manfaat. Ketika Penerima manfaat tidak memanfaatkan dana bantuan sesuai peruntukannya maka dapat dikatakan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar kurang maksimal karena tidak memenuhi tujuan utama dari program.

(4) Kesenjangan antara kebijakan PIP dengan kondisi nyata di lapangan

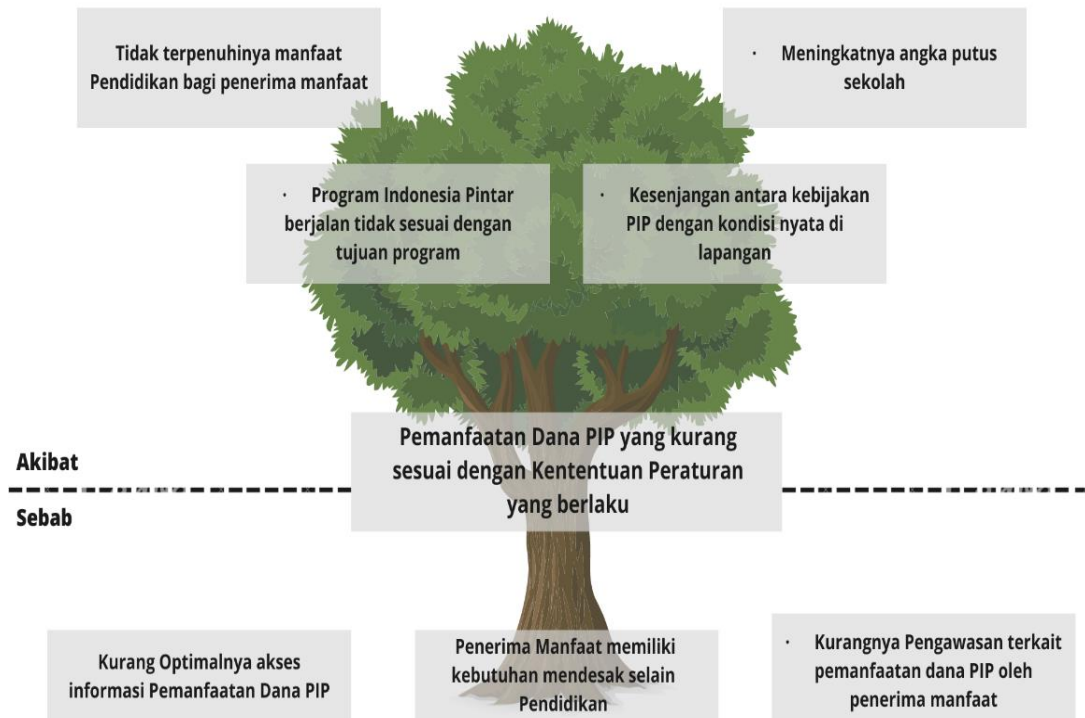
Melalui hasil observasi dan studi lapangan pada tahap awal, praktikan menemukan bahwa masih banyak siswa yang nyatanya belum dapat memenuhi kebutuhan sekolah meskipun menerima PIP. Kesenjangan disini memiliki maksud yaitu adanya ketidaksesuaian antara harapan dari program yaitu Dana PIP membantu pemenuhan kebutuhan personal pendidikan dan kondisi riil di lapangan. Pemanfaatan Dana PIP yang kurang sesuai dengan peraturan menjadi faktor utama adanya kesenjangan kebijakan antara tujuan program dan operasionalnya di Lapangan.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka berdasarkan tingkat kemendesakkannya dan luasnya dampak yang dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang adalah ketidakpahaman penerima manfaat tentang tujuan dan alokasi dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang.

4) Analisis Pohon Masalah

Analisis Pohon masalah merupakan suatu alat atau teknik pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa factor yang saling terkait. Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari masalah Pemanfaatan Dana PIP yang kurang sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku.



Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Pemanfaatan Dana PIP

b) Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pengetahuan Pemanfaatan Dana PIP
- 2) Peningkatan kesadaran Penerima Manfaat terhadap pentingnya pemanfaatan Dana PIP sesuai Tujuan program
- 3) Pengawasan Pemanfaatan Dana PIP oleh pihak Sekolah bekerjasama dengan Pihak Pemerintah

c) Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan penjelasan tentang identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian permasalahan terkait

dengan Pemanfaatan Dana PIP oleh Penerima Manfaat di Kelurahan Rancanumpang adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi program Indonesia Pintar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kapasitas dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada penerima manfaat terkait alokasi dan pemanfaatan dana bantuan PIP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki peran dalam mendukung pendataan siswa miskin sehingga dapat diverifikasi dan validasi secara lengkap terkait kesesuaian data penerima manfaat.

3) Pekerja Sosial

Pekerja Sosial sebagai inisiator penggerak awal terkait dengan pengawasan dari Pemanfaatan Program Indonesia Pintar yang ada di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang

4) Sekolah

Sekolah sebagai penyelenggara yang sangat berdekatan dengan Penerima Manfaat sehingga Sekolah dengan Operator memiliki kapasitas dalam memberikan pemahaman dan informasi secara langsung terkait pemanfaatan Dana PIP yang sesuai dengan ketentuan.

2.2.4 Rencana Intervensi

a) Latar Belakang

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan. Untuk menekan angka putus sekolah pemerintah memperluas akses pendidikan yang lebih bermutu dan merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin. Perhatian itu berupa pemberian dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Upaya Peningkatan Pemahaman Pemanfaatan Dana PIP digelar dalam rangka meningkatkan pengelolaan dana bantuan PIP agar tepat sasaran dan sesuai dengan pemanfaatannya berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019. Ketika dilihat di Lapangan terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan dana PIP yang dilandasi oleh berbagai hal

muali dari ketidaktahuan sasaran sampai dengan sikap ketidakpedulian sasaran terhadap alokasi pemanfaatan dana PIP. Oleh karena itu, praktikan merencanakan intervensi dalam rangka membantu penyelesaian masalah terkait dengan Pemanfaatan Dana PIP yang kurang tepat oleh Sasaran melalui kegiatan **“Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang”**

b) Tujuan umum dan khusus

(1) Tujuan Umum

Tujuan diadakannya **“Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang”** adalah Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam Pemanfaatan Dana PIP sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari program **“Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang”** adalah:

1. Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang memahami kriteria Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar
2. Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang dapat Memahami Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar
3. Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang dapat mendukung keberhasilan Program Indonesia Pintar
4. Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang dapat berperan dalam pengurangan angka putus sekolah

c) Bentuk kegiatan dan Program

Program dan Kegiatan terkait dengan **“Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang”** dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Sosialisasi Tata Cara Penyaluran Dana PIP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Rancanumpang.

2. Sosialisasi Alokasi Pemanfaatan Dana PIP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Rancanumpang.

Tabel 2.8 Bentuk Kegiatan Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Sosialisasi terkait Tata Cara Penyaluran dan Alokasi Dana PIP	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang	Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar	Sekolah bekerjasama dengan Kasi Kessos Kelurahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 hari	Kelurahan Rancanumpang

d) Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat PIP. Sistem partisipan terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam program Peningkatan Pemahaman Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat PIP, telah ditentukan sistem partisipan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 Sistem Partisipan Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i> Pihak yang mengkoordinasikan perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial
2	<i>Change Agent System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan atau pemecahan masalah	Pekerja Sosial
3	<i>Client System</i> Penerima manfaat primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Orang Tua Penerima Manfaat PIP • Sekolah
4	<i>Support System</i> Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan atau bantuan dalam rangka penyelesaian masalah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	<i>Controlling System</i> Seseorang/lembaga yang berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menyetujui adanya perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
6	<i>Implementing System</i> Staff atau <i>vouunteer</i> yang bertugas untuk melaksanakan intervensi	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah
7	<i>Target System</i> Pihak yang harus diubah agar tujuan intervensi masyarakat dapat tercapa	<ul style="list-style-type: none"> • Orang Tua Penerima Manfaat PIP • Sekolah
8	<i>Action System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja Sosial • Dinas Sosial • Sekolah

e) Metode dan Teknik

1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah “*community organization dan community development*”, Metode pekerjaan sosial ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Tujuan dari metode *Community Organization* ini sangat relevan dengan program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan Pemahaman Masyarakat. Metode ini digunakan untuk membantu masyarakat agar mampu secara mandiri untuk memobilisir dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada secara mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar masyarakat dapat mengetahui dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan pemahaman orang tua penerima manfaat PIP tentang Pemanfaatan Dana PIP.

(1) Teknik

Teknik pekerjaan sosial merupakan sekumpulan gagasan yang sengaja dibuat untuk membantu pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial kepada klien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teknik yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi

Berarti suatu kerjasama yang erat antara sistem sasaran dan sistem kegiatan. Sudah ada kesepakatan antara sistem kegiatan dengan sistem sasaran tentang perlunya upaya perubahan. Selain itu, dukungan sumber cukup terjamin. Partisipasi dalam Kolaborasi yang dilaksanakan akan sangat mendukung dalam pencapaian tujuan program. *Participation* mencakup suatu kegiatan yang melibatkan seluruh anggota dari kelompok sasaran. Implementasi sebenarnya bukan suatu taktik khusus, melainkan suatu upaya lanjutan jika komunitas atau kelompok sasaran sudah sangat memahami apa yang menjadi tujuan serta kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Mereka sudah memiliki kehendak yang kuat untuk melaksanakan kegiatan. Hal yang perlu dilakukan adalah memperjelas atau mendefinisikan Peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku, serta tahapan kerja yang harus dilalui. Pekerja sosial hanya berperan menjadi pendamping, dimana masyarakat menjadi pelaku utamanya.

2. Pendampingan Sosial

Pendampingan Sosial merupakan suatu taktik inti yang harus dilakukan sehubungan dengan tujuan pengembangan masyarakat yang akan dilakukan. Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan penerima manfaat yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam Peningkatan pemahaman masyarakat terkait Pemanfaatan Dana PIP.

f) Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

- 1) **Rencana Anggaran Biaya**

Program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang dimana untuk merealisasikan program Program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan program Program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program Program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi

Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang.
Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Rencana Anggaran Biaya Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP

No	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Persiapan	ATK	5 paket	Rp.7.000	Rp.39.600
		Kertas plano	5 lembar	Rp.650	Rp. 3.250
		Hvs	1 rim	Rp. 40.000	Rp.40.000
		Jumlah			
2.	Pelaksanaan	ATK	25 paket	Rp. 6.000	Rp. 30.000
		Modul	25 eksemplar	Rp. 15.000	Rp. 375.000
		HVS	1 rim	RP. 40.000	Rp. 40.000
		Spanduk	2 lembar	Rp. 40.000	Rp. 80.000
		Snack peserta	2 kali x 20 box	Rp. 5.000	Rp. 200.000
		Snack panitia	2 kali x 10 box	Rp. 500.000	Rp. 100.000
		Snack pemateri	5 box	Rp. 7.000	Rp. 35.000
		Proyektor	1 buah	Rp. 300.000	Rp. 300.000
		Honor pemateri	5 orang	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca pelaksanaan	ATK	5 paket	Rp.6.000	Rp. 30.000
		Bahan computer	1 paket	Rp. 175.000	Rp. 175.000
		Kertas plano	5 lembar	Rp. 650	Rp. 3.250
		Snack	10 box	Rp. 7.000	Rp. 70.000
		Jumlah			
4.	Dana darurat				Rp.200.000
Jumlah					Rp. 2.720.750

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang.

Tabel 2.11 Alat dan Bahan Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP

DAFTAR PERALATAN	DAFTAR BAHAN
komputer / laptop	Kertas plano
Proyektor	Kertas HVS
Mikrofon	Alat tulis
Speaker	Taplak meja
Meja	Tinta printer
Kursi	
Printer	

g) Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat factor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan factor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT praktikan gunakan untuk menguji kelayakan Program Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang. Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh *alternative* ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif *defensive* dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Analisis SWOT dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.12 Analisis SWOT pada Program Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP

	<p>Kekuatan(S): 1) Tersedia Sumber Daya Pelaksana 2) PIP dianggap menjadi program yang urgensinya tinggi</p>	<p>Kelemahan(W): Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap program</p>
<p>Peluang (O): 1) Dukungan dari Tokoh Masyarakat, aparat RT&RW serta masyarakat 2) Memanfaatkan media masa sebagai penyebaran informasi PIP</p>	<p>Strategi SO Meningkatkan Koordinasi Panitia dengan Stakeholder yang mendukung kegiatan</p>	<p>Strategi WO Memaksimalkan peran tokoh masyarakat dan aparat untuk meningkatkan antusiasme masyarakat</p>
<p>Ancaman (T): Materi Sosialisasi tidak diterapkan oleh masyarakat</p>	<p>Strategi ST Memberikan contoh secara langsung agar dapat dipahami dan di implementasikan oleh sasaran</p>	<p>Strategi WT Menyebarkan pamphlet agar masyarakat membaca Kembali materi sosialisasi</p>

h) Jadwal dan Langkah-langkah

1) Langkah-Langkah

Berikut adalah Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang:

a. Pra Sosialisasi

Tahap Pra Kegiatan dilakukan selama 1 hari untuk mempersiapkan kegiatan Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- a) Mendata Sasaran
- b) Menghubungi Narasumber
- c) Merancang Materi
- d) Menyebarkan Undangan dan Poster

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari, berlokasi di Aula Kelurahan Rancanumpang. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan sosialisasi:

- a) Pemaparan Materi
- b) Diskusi
- c) Penutup

c. Pasca Sosialisasi

Tahap pasca sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- a) Evaluasi Kegiatan
- b) Menyusun Laporan Kegiatan

2) Jadwal Kegiatan

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar di Kelurahan Rancanumpang. Kegiatan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB.

Tabel 2.13 Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Dana PIP

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	09.00 – 09.20	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Dinas Sosial
2.	09.20 – 10.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Mekanisme dan Kriteria Pendaftaran Program Indonesia Pintar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Dinas Sosial
3.	10.00- 10.15	Ice breaking	Sie. Acara	<i>Games</i>	Sie. Acara
4.	10.15- 11.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Kategori Pemanfaatan PIP sesuai peraturan	Sekolah
5.	11.00 – 11.35	Diskusi	Sie. Acara	Tanya jawab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Sekolah
6.	11.35 – 11.45	Penutupan	Sie. Acara	Foto bersama	-

2.3 Profil Pemberdayaan Sosial

PENINGKATAN KETERAMPILAN PENGANGGURAN MELALUI PELATIHAN SABLON DISTRO DI KELURAHAN RANCANUMPANG

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan.

Badan Pusat Statistik merilis data tentang Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Agustus 2022. BPS menyatakan sebanyak 2,13 juta jiwa warga di Jawa Barat dinyatakan menganggur. Dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar mencapai 8,31 persen. Banyaknya para pencari kerja di Provinsi Jawa Barat ini tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyak orang tidak mendapatkan kesempatan bekerja, akibatnya jumlah pengangguran semakin bertambah yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mencatat jumlah pengangguran di wilayahnya mencapai angka 102.000. Sebanyak 60% pengangguran di Kota Bandung merupakan lulusan SMA atau SMK.

Kemudian, Kelurahan Rancanumpang yang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kota Bandung memiliki data pengangguran sebagai berikut:

Tabel 2.14 Data Pengangguran Kelurahan Rancanumpang

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Penduduk usia kerja 15-56 Tahun	4.575
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja 15-56 Tahun tidak bekerja	95
3	Penduduk Wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	1000
4	Jumlah penduduk usia >15 tahun yang cacat sehingga tidak bekerja	5

Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang sejumlah 95 orang dan kebanyakan merupakan warga yang telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Pabrik yang ada di sekitar Kelurahan Rancanumpang. Isu Pengangguran ini

dianggap perlu diperhatikan karena adanya korelasi dan dampak pada perekonomian warga dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga pengangguran tersebut.

2.3.2 Tinjauan konsep

a) Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- 3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

b) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dikomunikasikan dengan baik dan benar. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa *“empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on”* (Ife, 1995). Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Menurut Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan Masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan Kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

c) **Elemen Kunci Pemberdayaan Masyarakat (World Bank(Narayan, 2002))**

1) *Access to Information*

Dalam melakukan pemberdayaan, informasi berperan sebagai salah satu sumber yang paling penting. Hal ini dikarenakan komunikasi yang baik terjalin karena masing-masing individu memiliki informasi yang dapat merekatkan hubungan mereka. Dengan adanya informasi yang memadai, orang akan mudah memberikan pelayanan dan menerima pelayanan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

2) *Inclusion and Participation*

Inklusi merupakan keseluruhan individu yang terlibat dalam pemberdayaan, baik subyek maupun pelaku pemberdayaan. Sedangkan partisipasi merupakan sebuah peran yang dilakukan individu untuk keberhasilan kelompoknya. Kedua faktor tersebut secara menyeluruh memiliki fungsi yang hampir sama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kemauan subyek pemberdayaan agar mau dan mampu diberdayakan

3) *Accountability*

Akuntabilitas merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak secara tepat. Dalam pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas dimaksudkan dalam ketepatan mengambil keputusan, ketepatan dalam menghitung dana, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan dan kemampuan untuk memprediksi penyelesaian masalah yang terbaik.

4) *Local Organization*

Kapasitas organisasi lokal mengacu pada kemampuan orang untuk bekerja sama, mengorganisasi dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah kepentingan umum. Sering di luar jangkauan sistem formal, masyarakat pedesaan bergantung pada satu sama lain untuk dukungan dan kekuatan dalam memecahkan masalah sehari-hari mereka. Organisasi lokal sering informal, seperti dalam kasus sekelompok wanita yang meminjamkan uang kepada satu sama lain atau beras. Mereka juga dapat formal, dengan atau tanpa pendaftaran hukum, seperti dalam kasus kelompok petani.

d) **Pengangguran**

Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat bekerja karna tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki lapangan pekerjaan maka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kehidupan dan hal ini berdampak pada rendahnya taraf kehidupan. Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak

bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan.

e) Jenis-Jenis Pengangguran

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 1994) :

- 1) Pengangguran Normal atau Friksional
Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional.
- 2) Pengangguran Siklikal
Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.
- 3) Pengangguran Struktural
Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari Negara - negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industry tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran Teknologi
Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994):

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka dapat terjadi ketika adanya ketimpangan antara jumlah pelamar kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Sehingga banyak angka usia kerja yang terus meningkat dan tidak mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat karena sedikit sekali angka usia kerja yang melakukan kegiatan produktif. Disebut pengangguran terbuka karena individu yang menagnggur tersebut secara nyata dan terangterangan tidak melakukan pekerjaan apapun. Hal tersebut tentu saja disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah seperti penurunan kualitas kegiatan ekonomi, serta teknologi yang mengalami kemajuan namun tidak ditopang oleh meningkatnya lowongan kerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Seseorang yang menganggur secara tidak sukarela karena disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari seperti yang kerap terjadi pada ekonomi sektor pertanian dan jasa. Sebuah perusahaan bisanya selalu membutuhkan tenaga kerja dalam operasionalisasi perusahaannya, akan tetapi apabila terlalu banyak tenaga kerja yang digunakan akan menyebabkan operasional perusahaan tidak efisien sehingga banyak tenaga kerja atau karyawan yang tidak melaksanakan tugas apa-apa sebab sudah dikerjakan oleh karyawan lain. Contoh dari seseorang yang disebut sebagai pengangguran tersembunyi adalah banyaknya jumlah pelayan pada sebuah restoran sementara restoran tersebut tidak terlalu membutuhkan pelayan yang terlalu banyak.

3) Pengangguran Musiman

Seseorang yang menganggur dikarenakan terjadinya perubahan musim tertentu disebut sebagai pengangguran musiman. Artinya, pada musim tertentu mereka tidak menganggur, akan tetapi ketika terjadi perubahan musim lain mereka akan kembali menganggur. Pengangguran musiman seringkali terjadi pada penduduk pedesaan yang mata pencahariannya bertumpu pada alam seperti pertanian, berkebun, atau nelayan yang mengelola ikan. Misalnya bagi individu yang bekerja sehari-hari berkebun, mereka akan bekerja ketika sudah musim buah-buahan tiba dan kemudian menjualkan kembali hasil panennya. Sementara apabila masa musim sudah selesai mereka tidak bekerja karena tidak ada hasil kebun yang harus dijual kembali.

4) Setengah Menganggur

Penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota kerap terjadi pada negara yang masih berada dalam fase berkembang. Hal tersebut bisa dikarenakan penduduk desa merasa bahwa kota memiliki banyak sekali mata

pencapaian. Namun pada kenyataannya, tidak semua penduduk desa yang pindah ke kota bisa segera mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah diharapkan. Sebagian lagi ada yang bekerja paruh waktu atau tidak sepenuhnya bekerja. Individu yang memiliki pekerjaan paruh waktu tersebut tidak sepenuhnya bekerja, atau bekerja serabutan sehingga disebut sebagai setengah menganggur.

f) Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja meningkatkan menurut Sofyandi adalah suatu usaha untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-undang no.13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat tertentu sesuai dengan jenjang dan keterampilan dan keahlian kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seseorang. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian atau pengetahuan tertentu. Program pelatihan berusaha mengajarkan bagaimana menunaikan aktivitas atau pekerjaan tertentu.

2.3.3 Asesmen

a) Identifikasi Masalah

- 1) Banyaknya Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang
Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang sejumlah 95 orang yang tersebar di 8 RW. Pengangguran menjadi suatu masalah karena mempunyai korelasi dengan pemenuhan kebutuhan dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 2) Terjadi PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja
Masyarakat di Kelurahan Rancanumpang yang menjadi Pengangguran Sebagian besar sejumlah 60% merupakan masyarakat yang terkena PHK dari Pabrik di sekitar Kelurahan Rancanumpang. Kemudian dipengaruhi oleh Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan Kembali.
- 3) Informasi pasar kerja masih kurang efektif
Informasi terkait pasar kerja masih belum sampai ke telinga masyarakat pencari kerja di Kelurahan Rancanumpang. Masyarakat tidak mengetahui lowongan pekerjaan ataupun informasi karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.

1) Penyebab masalah

(1) Tidak tersedianya Lapangan Pekerjaan

Masyarakat belum mendapat kesempatan kerja karena tidak ada lapangan kerja yang menerimanya. Lapangan Pekerjaan juga terbilang sangat sedikit dan terbatas. Hal ini dikarenakan tidak ada masyarakat tidak mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.

(2) Kelompok Usia Kerja tidak memiliki keterampilan

Keterampilan menjadi salah satu faktor penting dalam mencari pekerjaan dan/atau menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang termasuk Kelompok Usia Kerja merupakan tamatan sekolah umum dan bukan sekolah kejuruan. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai keterampilan saat mencari pekerjaan setelah lulus sekolah.

(3) Banyaknya jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk maka akan menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Kontrol akan peningkatan jumlah penduduk sangat perlu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

(4) Rendahnya tingkat Pendidikan

Menurut Simanjutak (1985) pendidikan dan pengangguran memiliki hubungan dimana semakin tinggi rata-rata pendidikan di suatu daerah maka akan mengalami peningkatan pada kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapat pekerjaan. Sedangkan di Kelurahan Rancanumpang rata-rata Pengangguran merupakan lulusan SMP sd SMA.

2) Dampak Masalah

(1) Meningkatkan Kemiskinan

Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin.

(2) Menurunnya daya beli masyarakat

Semakin rendah daya beli masyarakat dapat dikatakan bahwa semakin rendah pula tingkat pendapatannya. Dalam hal ini pengangguran yang tidak memiliki pendapatan akan menyebabkan daya beli menurun dan akan termasuk pada kategori masyarakat miskin.

(3) Menurunnya kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar

Pengangguran tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Oleh karena itu, akan menyebabkan kesejahteraan dari keluarga pengangguran juga menurun.

(4) Meningkatkan kriminalitas

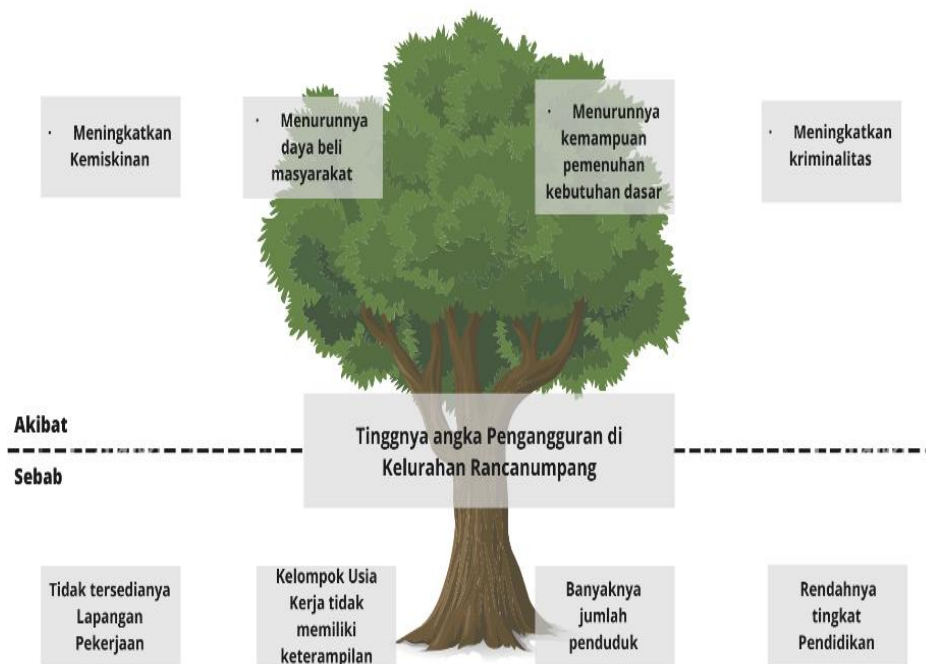
Pengangguran memberikan tekanan psikologis bagi para penganggur yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminal. Tekanan ini membuat para penganggur tidak dapat berpikir jernih dan membuatnya menghalalkan segala cara termasuk tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka berdasarkan tingkat kemendesakkannya dan luasnya dampak yang dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah banyaknya pengangguran di Kelurahan Rancanumpang

4) Analisis Pohon Masalah

Analisis Pohon masalah merupakan suatu alat atau teknik pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa faktor yang saling terkait. Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari masalah tingginya angka pengangguran di Kelurahan Rancanumpang.



Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Tingginya Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang

b) Identifikasi Kebutuhan

1) Pelatihan Keterampilan Usia Angkatan Kerja

Pelatihan yang dilakukan hadir untuk membantu para tenaga kerja meningkatkan kompetensinya. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Pelatihan yang dibuat akan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat dalam hal ini yaitu Pelatihan Sablon.

2) Pembukaan Lapangan Pekerjaan sesuai dengan Pelatihan Keterampilan

Lapangan Kerja yang akan dibuka disesuaikan dengan Pelatihan yang telah dilakukan yaitu Pelatihan Sablon. Pembukaan Lapangan kerja dilakukan dengan membuat kelompok yang akan memudahkan akses bantuan untuk didapatkan oleh penerima manfaat.

c) Identifikasi Potensi dan Sumber

(1) Dinas Sosial.

Dinas sosial dapat berperan sebagai narasumber dan pengawas kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.

(2) Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam memberikan pelatihan dan penyediaan informasi pasar kerja serta berperan dalam pembukaan lapangan pekerjaan kepada sasaran program yaitu Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang.

(3) Pekerja Sosial

Pekerja Sosial akan memainkan perannya sebagai insiator dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam proses Pemberdayaan kepada Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang.

(4) Karang Taruna

Karang Taruna sebagai pemegang dan pelaksana program Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sasaran yaitu Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang.

(5) Paguyuban Aspek (Asosiasi Pedagang Kawasan sekitar Stadion)

Akses Kerjasama akan dibangun dalam memanfaatkan informasi dari paguyuban Aspek mengenai sistematika penjualan yang ada di GBLA (Gelora Bandung Lautan Api).

(6) Ikon Kecamatan Gedebage (Gelora Bandung Lautan Api & Masjid Al-Jabbar)

Memanfaatkan Ikon Kecamatan Gedebage dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam membangun program yang dapat menarik minat dari konsumen.

(7) Percetakan Sablon Gedebage (Ayongepint)

Percetakan Sablon Gedebage (Ayongepint) sebagai tempat vendor yang dapat diajak bermitra dalam pengembangan dan Peningkatan kemampuan dari Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang

2.3.4 Rencana Intervensi

a) Latar Belakang

Permasalahan pengangguran merupakan masalah nasional yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia, demikian juga di Kota Bandung, khususnya Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage. Melihat berbagai permasalahan dan urgensi dari upaya mengatasi pengangguran di Kelurahan Rancanumpang diperlukan upaya konkrit untuk mengatasi permasalahan pengangguran tersebut. Usia angkatan kerja dituntut untuk memiliki keahlian yang sesuai tren pasar kerja yang membutuhkan keahlian

yang seringkali tidak kita temukan di pendidikan formal. Proses Pendidikan Informal justru akan lebih diperlukan oleh mereka sebagai penerima manfaat agar mendapat keterampilan guna mencari pekerjaan dan/atau menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Dengan adanya kondisi ini, maka perlu adanya dukungan bagi pengembangan kegiatan usaha berbasis masyarakat. Hal ini berguna untuk menekan angka pengangguran. Kebutuhan Peningkatan keterampilan dari masyarakat yang pengangguran dibutuhkan untuk mengatasi masalah lanjutan yang kemungkinan akan terjadi jika pelatihan tidak dilaksanakan. Untuk mengatasi masalah Peningkatan Angka Pengangguran yang akan semakin tinggi maka akan sangat diperlukan pelatihan ataupun Peningkatan keterampilan bagi pengangguran di Kelurahan Rancanumpang. Oleh karena itu sangat diperlukan dan ditingkatkan langkah-langkah pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Antara lain dapat melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Pelatihan dapat dikatakan sebagai proses mengajarkan keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka.

Oleh karena itu, praktikan merencanakan intervensi dalam rangka membantu penyelesaian masalah terkait dengan Angka Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang melalui kegiatan **“Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang”**

b) Tujuan umum dan khusus

(1) Tujuan Umum

Tujuan diadakannya **“Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang”** adalah untuk menekan angka Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang

(2) Tujuan Khusus

Adapun Tujuan Khusus dari program **«“Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang”** adalah:

1. Peningkatan Pengetahuan terkait tata cara sablon distro
2. Peningkatan Keterampilan proses sablon terutama pada bahan kaos
3. Peningkatan Sikap Kerja Angkatan Usia Kerja
4. Peningkatan Kreativitas bidang desain agar dapat dipadupadankan dengan keterampilan sablon

c) Bentuk Kegiatan dan Program

Program **“Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang”** akan

dilaksanakan beberapa bentuk kegiatan yang ditujukan kepada Angkatan Usia Kerja di Kelurahan Rancanumpang yaitu :

- 1) Pemberian Bimbingan Pelatihan Tatacara dan Proses Sablon terutama bahan Kaos

Diharapkan secara berkelanjutan dapat menumbuhkan motivasi mereka untuk berkarya dan melakukan kegiatan yang produktif. Kemudian, dalam jangka yang ditentukan peserta yang ikut dalam pelatihan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat.

- 2) Penyuluhan Kewirausahaan dan Manajemen Pemasaran Sablon Distro

Penyuluhan dilakukan dikarenakan oleh urgensi dari pengetahaun terkait kewirausahaan dan manajemen pemasaran yang harus dikuasai oleh Sasaran agar dapat mengembangkan usaha sebagai pengaplikasian dari pelatihan yang telah dilakukan.

- 3) Pemberian Informasi Pasar Kerja

Informasi Pasar Kerja yang diberikan kepada sasaran berkaitan dengan pemanfaatan potensi dan sumber sebagai pendukung kegiatan kewirausahaan mereka. Selanjutnya diberikan juga informasi pemanfaatan ikon dari suatu daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik dari produk yang dipasarkan.

Tabel 2.15 Bentuk Kegiatan Program Pelatihan Sablon Distro

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Pelatihan Sablon Distro	Angkatan Kerja di Kelurahan Rancanumpang	menekan angka Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang	Pekerja Sosial	Lurah	2 hari	Kelurahan Rancanumpang
Penyuluhan Kewirausahaan dan Manajemen Pemasaran	Angkatan Kerja di Kelurahan Rancanumpang	menekan angka Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang	Pekerja Sosial	Lurah	1 hari	Kelurahan Rancanumpang

d) Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam program Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang. Dalam program Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang, telah ditentukan sistem partisipan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.16 Sistem Partisipan Program Pelatihan Sablon Distro

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i> Pihak yang mengkoordinasikan perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial
2	<i>Change Agent System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan atau pemecahan masalah	Pekerja Sosial
3	<i>Client System</i> Penerima manfaat primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Angkatan Usia Kerja di Kelurahan Rancanumpang
4	<i>Support System</i> Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan atau bantuan dalam rangka penyelesaian masalah	(3) Dinas Ketenagakerjaan (4) Dinas Sosial
5	<i>Controlling System</i> Seseorang/lembaga yang berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menyetujui adanya perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	(5) Dinas Ketenagakerjaan (6) Dinas Sosial
6	<i>Implementing System</i> Staff atau <i>voullenteer</i> yang bertugas untuk melaksanakan intervensi	(7) Dinas Ketenagakerjaan (8) Dinas Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja Sosial
7	<i>Target System</i> Pihak yang harus diubah agar tujuan intervensi masyarakat dapat tercapa	<ul style="list-style-type: none"> • Angkatan Usia Kerja di Kelurahan Rancanumpang
8	<i>Action System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas	(9) Dinas Ketenagakerjaan (10) Dinas Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja Sosial

e) Metode dan Teknik

(1) Metode

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode *community organization/community organization* (COCD) dimana dalam metode ini diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Metode ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini Pengangguran dan Angkatan Usia Kerja sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

(2) Teknik

1. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain, yang

terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna. Pelatihan dilakukan dengan menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan ditempat kerja, maka diharapkan dapat mengatasi pengangguran di Kelurahan Rancanumpang.

2. Kolaborasi

Berarti suatu kerjasama yang erat antara sistem sasaran dan sistem kegiatan. Sudah ada kesepakatan antara sistem kegiatan dengan sistem sasaran tentang perlunya upaya perubahan. Selain itu, dukungan sumber cukup terjamin. Partisipasi dalam Kolaborasi yang dilaksanakan akan sangat mendukung dalam pencapaian tujuan program. Participation mencakup suatu kegiatan yang melibatkan seluruh anggota dari kelompok sasaran. Implementasi sebenarnya bukan suatu taktik khusus, melainkan suatu upaya lanjutan jika komunitas atau kelompok sasaran sudah sangat memahami apa yang menjadi tujuan serta kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Hal yang perlu dilakukan adalah memperjelas atau mendefinisikan Peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku, serta tahapan kerja yang harus dilalui.

3. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial adalah proses yang dijalankan oleh para pendamping sosial dengan bersinergi dengan berbagai *stakeholder* dan masyarakat. Objektif dari pendampingan sosial yaitu memperkuat dukungan sosial, menyelesaikan masalah, hingga meningkatkan pelayanan sosial. Teknik ini digunakan dalam tahap pasca kegiatan untuk mendukung masyarakat yang telah diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diberikan.

f) Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran

Program Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang dimana untuk merealisasikan program Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan program Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.17 Rencana Anggaran Biaya Program Pelatihan Sablon Distro

No	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah	
1.	Pelatihan Sablon Distro	Persiapan				
		• Atk	5 paket	Rp.7.920	Rp.39.600	
		• Kertas plano	5 lembar	Rp.625	Rp.3.125	
		• Hvs	1 rim	Rp.41.000	Rp.41.000	
		• Snack	15 box	Rp.5.000	Rp.75.000	
		Jumlah				Rp.158.725
		Pelaksanaan				
		• ATK	25 paket	Rp.6.096	Rp.152.400	
		• Modul	25 eksemplar	Rp.15.000	Rp.375.000	
		• Kertas plano	10 lembar	Rp.625	Rp.6.250	
		• HVS	1 rim	Rp.41.000	Rp.41.000	
		• Spanduk	2 lembar	Rp.36.000	Rp.72.000	
		• makan peserta dan panitia	3 kali x 30 porsi	Rp.25.000	Rp.2.250.000	
		• Snack peserta	2 kali x 20 box	Rp.5.000	Rp.200.000	
		• Snack panitia	2 kali x 10 box	Rp.5.000	Rp.100.000	
		• Snack pemateri	5 box	Rp.10.000	Rp.50.000	
		• Gallon	2 buah	Rp.19.500	Rp.39.000	
		• Sewa Asrama peserta	5 kamar	Rp.75.000	Rp.375.000	
		• Honor pemateri	5 orang	Rp.250.000	Rp.1.250.000	
		Jumlah				Rp.4.910.650
		Pasca pelaksanaan				
		• ATK	5 paket	Rp.6.250	Rp.31.250	
		• Bahan computer	1 paket	Rp.175.000	Rp.175.000	
		• Kertas plano	5 lembar	Rp.625	Rp.3.125	
		• Snack	10 box	Rp.10.000	Rp.100.000	
		Jumlah				Rp.309.375

No	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah	
2.	Penyuluhan Kewirausahaan dan Manajemen Pemasaran	Persiapan				
		• Atk	5 paket	Rp.7.920	Rp.39.600	
		• Kertas plano	5 lembar	Rp.625	Rp.3.125	
		• Hvs	1 rim	Rp.41.000	Rp.41.000	
		• Snack	15 box	Rp.5.000	Rp.75.000	
		Jumlah				Rp.158.725
		Pelaksanaan				
		• Leafet	30 lembar	Rp.1000	Rp.30.000	
		• Spanduk	2 lembar	Rp.36.000	Rp.72.000	
		• Snack peserta	30 box	Rp.5.000	Rp.150.000	
		• Snack pemateri	3 box	Rp.10.000	Rp.30.000	
		• Snack panitia	10 box	Rp.5.000	Rp.50.000	
		• Honor pemateri	3 orang	Rp.300.000	Rp.900.000	
		• ATK	5 paket	Rp.3.100	Rp.15.500	
		Jumlah				Rp.1.247.500
		Pasca pelaksanaan				
		• ATK	5 paket	Rp.6.250	Rp.31.250	
		• Bahan computer	1 paket	Rp.175.000	Rp.175.000	
		• Kertas plano	5 lembar	Rp.625	Rp.3.125	
		• Snack	10 box	Rp.10.000	Rp.100.000	
Jumlah				Rp.309.375		
3.	Dana darurat				Rp.500.000	
Jumlah keseluruhan					Rp.7.594.350	

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam program Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang.

Tabel 2.18 Alat dan Bahan Pelatihan Sablon Distro

No.	Alat	Jumlah
1.	Laptop	1 Buah
2.	Proyektor	1 Buah
3.	Microphone	2 Buah
4.	Kamera	2 Buah
5.	Sound system	2 Buah
6.	LCD	1 Buah
7.	Alat Sablon	10 Paket
8.	ATK	5 Paket
9.	Modul	25 ksemplar

g) Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan factor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT praktikan gunakan untuk menguji kelayakan Program Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang. Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam Program Peningkatan Keterampilan Pengangguran Melalui Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh *alternative* ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif *defensive* dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Analisis SWOT dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.19 Analisis SWOT Program Pelatihan Sablon Distro

	<p>Kekuatan(S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya Komitmen Peningkatan Pemahaman masyarakat yang tinggi dari Panitia 2) Sasaran memiliki antusias yang tinggi dalam pembentukan program 	<p>Kelemahan(W):</p> <p>Adanya kemungkinan kelompok gagal dalam produksi sablon</p>
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Narasumber yang akan menyajikan materi 2) Adanya Sosial Media sebagai salah satu sarana promosi dan iklan 3) Adanya Ikon Kecamatan Gedebage yaitu GBLA dan Al-Jabbar 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Koordinasi Panitia dengan Stakeholder yang mendukung kegiatan 2) Memaksimalkan substansi materi yang dimiliki dengan menggabungkan materi dari milik pemerintah dengan narasumber lain 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan contoh dan demonstrasi yang mudah dipahami oleh sasaran 2) Memaksimalkan Potensi Promosi dengan menciptakan sistem baru yang menarik minat konsumen
<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya Sumber Dana Penyelenggaraan Program Sosialisasi 2) Materi Sosialisasi tidak diterapkan oleh masyarakat 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memaksimalkan dana yang diperoleh dari stakeholder 2) Memaksimalkan pendampingan bagi kelompok sasaran 	<p>Strategi WT</p> <p>Menyebarkan pamphlet agar masyarakat membaca Kembali materi sosialisasi</p>

h) Jadwal dan Langkah-langkah

1. Langkah-Langkah Kegiatan

Berikut adalah langkah –langkah Pelatihan Sablon Distro Di Kelurahan Rancanumpang:

a. Pra Kegiatan

Tahap pra kegiatan merupakan tahap untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilaksanakan selama 1 hari. Adapun rincian kegiatan pada tahap pra kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk kepanitiaan
- b) Mengidentifikasi narasumber
- c) Mendata peserta
- d) Mempersiapkan sarana prasarana

b. Kegiatan

- a) Waktu : 3 Hari
- b) Lokasi: Aula Kelurahan Rancanumpang
- c) Rencana Kegiatan:
 - (3) Registrasi
 - (4) Pembukaan
 - (5) Pemberian materi
 - (6) Dinamika kelompok
 - (7) Post-test
 - (8) Penutupan

c. Pasca Kegiatan

Tahap pasca kegiatan dilakukan untuk melakukan evaluasi Program Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang, berikut adalah rincian kegiatan dalam tahap pasca kegiatan:

- a) Pendampingan
- b) Evaluasi kegiatan
- c) Membuat laporan kegiatan

2. Jadwal Kegiatan

Berikut adalah jadwal pelaksanaan Program Pelatihan Sablon Distro di Kelurahan Rancanumpang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama acara dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.15 WIB kemudian dilanjutkan kembali di hari kedua dan ketiga pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB.

Tabel 2.20 Jadwal Pelaksanaan Program Pelatihan Sablon Distro

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
Hari Pertama					
1.	08.00 – 08.20	Registrasi	Sekretaris	-	-
2.	08.20 – 09.00	Pembukaan	Sie. Acara	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pelaksana • Lurah Rancangan
3.	09.00 – 10.30	Materi 1	Sie. Acara	Pentingnya Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan & Pekerja Sosial
4	10.30-12.10	Materi 2	Sie. Acara	Peluang Usaha Sablon Distro	Dinas Ketenagakerjaan
5	12.10-12.15	Penutup			
Hari Kedua					
No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	08.00 – 08.20	Registrasi	Sekretaris	-	-
2.	08.20 – 09.00	Pembukaan	Sie. Acara	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pelaksana • Lurah Rancangan
3.	09.00 – 11.30	Pelatihan	Sie. Acara	Proses Persiapan Desain Sablon dengan memanfaatkan Ikon Gedebage	Pemateri dari AyoNgeprint
4	11.30-12.00	Istirahat			
5	12.00-13.25	Pelatihan	Sie. Acara	Proses Pelaksanaan Tatacara Sablon yang efektif dan Efisien	Pemateri dari AyoNgeprint
6	13.25-13.30	Penutup			

Hari Ketiga					
No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	08.00 – 08.20	Registrasi	Sekretaris	-	-
2.	08.20 – 09.00	Pembukaan	Sie. Acara	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pelaksana • Lurah Rancanumping
3.	09.00 – 11.30	Pelatihan	Sie. Acara	Mekanisme Penjualan Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketenagakerjaan • Pemateri AyoNgeprint
4	11.30-12.00	Istirahat			
5	12.00-13.25	Pelatihan	Sie. Acara	Mekanisme Perekrutan Pegawai dalam manajemen Pengelolaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketenagakerjaan • Pemateri AyoNgeprint
6	13.25-13.30	Penutup			

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT DAERAH ALIRAN SUNGAI MELALUI PENYULUHAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

2.4.1 Gambaran Umum Masalah

Jumlah penduduk yang terus bertambah serta kecenderungan pemanfaatan lahan untuk kegiatan manusia di sekitar sungai mengakibatkan penurunan fungsi sungai. Ditandai dengan dengan penyempitan lebar sungai, pendangkalan dan pencemaran sungai. Fungsi sungai sebagai tempat aliran air beralih menjadi permukiman dan tempat kegiatan manusia. Kapasitas sungai yang sudah berkurang salah satu penyebabnya ialah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan perilaku masyarakat yang masih suka membuang sampah di sungai. Hal ini tentu saja menyebabkan penyempitan terhadap ruang lingkup sungai. Debit air yang terus berubah dipengaruhi oleh curah hujan. Sedangkan kondisi lahan dan perubahan yang terjadi di alur sungai ialah karakter dari setiap sungai dan ditentukan oleh kondisi geohidrologi wilayah dan budaya masyarakat. Upaya pengendalian banjir secara fisik ialah dengan melakukan kegiatan pengendalian banjir yang bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti bendungan, tanggul, peningkatan kapasitas alur ataupun pengalihan frekuensi banjir sesuai debit banjir rencana.

Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang dibanyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*). Tidak optimalnya kondisi DAS antara lain disebabkan tidak adanya keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS tersebut. Tidak optimalnya kondisi DAS juga disebabkan oleh penghuni DAS itu sendiri yaitu manusia. Manusia masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadangkala bertolak belakang. Sulitnya koordinasi dan sinkronisasi tersebut lebih terasa dengan adanya otonomi daerah dalam pemerintahan dan pembangunan dimana daerah berlomba-lomba memacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada termasuk DAS sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kondisi DAS. Perubahan kondisi DAS yang terjadi ialah semakin meluasnya lahan untuk budidaya yang tidak terkendali, peruntukan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah maupun air, mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, semakin meningkatnya laju erosi yang dapat berakibat pada penurunan produktivitas lahan. Jika hal ini terus di biarkan pada gilirannya DAS akan mengalami kerusakan.

Berbagai dampak akan terjadi sebagai akibat pemanfaatan lahan yang kurang seimbang, salah satu dampak yang mungkin terjadi ialah masalah banjir sebagai akibat air hujan yang melimpah memasuki wilayah utara kota Bandung dan kemudian mengalir ke arah selatan akibat kemiringan topografi. Kawasan terbuka di wilayah Gede Bage saat ini merupakan daerah genangan air, tetapi permasalahan banjir tersebut belum secara langsung menyentuh masyarakat, kawasan tersebut telah dibangun menjadi kawasan primer industri, maka permasalahan banjir menjadi sangat dominan karena akan mengganggu jalannya roda perindustrian pada kawasan tersebut. Kawasan Gede Bage dan beberapa kawasan lain sekitarnya merupakan Kawasan di bagian selatan kota Bandung merupakan daerah yang secara periodik mengalami banjir sejak tahun 1986 dengan luasan kurang lebih 8.000 ha.

2.4.2 Tinjauan konsep

a) Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

b) Lingkungan

Lingkungan merupakan Keseluruhan objek dan kekuatan eksternal (*external forces*) yang mempengaruhi organisme-organisme (manusia, hewan, tumbuhan) yang saling berinteraksi atau salah satunya dipengaruhi oleh yang lain. (Campbell, 1983). Menurut Sartain (Ngalim Purwanto, 2014: 28) lingkungan meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang alam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes* kita kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. Konsep Ruang (ekosistem) dalam Ekologi dipengaruhi/dibangun oleh dua jenis lingkungan:

1) Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik dapat didefinisikan sebagai apa yang beroperasi secara berkelanjutan tanpa memandang orang-orang di dalamnya. Lingkungan fisik kemudian memengaruhi tindakan dan hasil yang menyangkut orang-orang di dalamnya. Menurut *Social Report*, Lingkungan fisik meliputi tanah, udara, air, tanaman dan hewan, bangunan dan infrastruktur lainnya, dan semua sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan dan peluang dasar kita untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

2) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Menurut soedjono, Lingkungan hidup sebagai lingkungan jasmani atau fisik yang ada di alam. Pengertian ini menyatakan bahwa manusia, fauna dan tumbuh-tumbuhan disaksikan dan dirasakan sebagai perwujudan jasmani jasmani.

c) Daerah Aliran Sungai (DAS)

DAS didefinisikan sebagai suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menerima air hujan, menampung, menyimpan, dan mengalirkan ke sungai dan seterusnya ke danau atau ke laut (kamus Weber dalam Sugiharto, 2001). Menurut Sugiharto (2001:20) DAS juga meliputi *basin, watershed, dan catchment area*. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS), menyatakan bahwa Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Secara ringkas definisi tersebut mempunyai pengertian DAS adalah salah satu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui sungai utama ke laut atau danau.

Definisi DAS berdasarkan fungsi DAS dibagi dalam beberapa batasan, yaitu pertama DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi. Fungsi konservasi dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. Kedua, DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Ketiga, DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang diindikasikan melalui keantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

d) Karakteristik DAS

Karakteristik DAS merupakan gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, topografi, tanah geologi, vegetasi, penggunaan lahan, hidrologi dan manusia. Karakteristik DAS pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu karakteristik biogeofisik dan karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan. Karakteristik DAS secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Karakteristik biogeofisik meliputi: karakteristik meteorologi DAS, karakteristik morfologi DAS, karakteristik morfometri DAS, karakteristik hidrologi DAS, dan karakteristik kemampuan DAS.
- 2) Karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan meliputi: karakteristik sosial kependudukan DAS, karakteristik sosial budaya DAS, karakteristik sosial ekonomi DAS dan karakteristik kelembagaan DAS.

Dalam sistem DAS ditunjukkan bahwa mekanisme perubahan hujan menjadi aliran permukaan sangat tergantung pada karakteristik daerah pengalirannya. Menurut Asdak (2010), besar kecilnya aliran permukaan dipengaruhi 2 (dua) faktor, yaitu faktor yang berhubungan dengan curah hujan dan karakteristik fisik DAS. Faktor karakteristik fisik DAS yang ikut berpengaruh terhadap aliran permukaan dapat dibedakan atas 2 (dua) kelompok, yaitu :

- 1) Karakteristik DAS yang stabil (*stable basin characteristics*), meliputi : jenis batuan dan tanah, kemiringan lereng, kerapatan aliran di dalam DAS
- 2) Karakteristik DAS yang berubah (*variable basin characteristics*), yaitu penggunaan lahan.

Struktur dan tekstur tanah berpengaruh terhadap proses terjadinya infiltrasi, kemiringan lereng akan mempengaruhi perjalanan aliran untuk mencapai outlet, dan alur-alur drainase akan mempengaruhi terbentuknya timbunan air permukaan (rawa, telaga, danau), kerapatan vegetasi/penutup lahan berpengaruh sebagai penghambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah.

e) Perubahan Penggunaan Lahan

Seyhan (1999) mengemukakan bahwa perubahan penggunaan lahan tidak akan membawa masalah yang serius sepanjang mengikuti kaidah konservasi tanah dan air serta kelas kemampuan lahan. Dari Aspek hidrologi, perubahan penggunaan lahan akan berpengaruh langsung terhadap karakteristik penutupan lahan sehingga akan mempengaruhi sistem tata air DAS. Fenomena ini ditunjukkan oleh respon hidrologi DAS yang dapat dikenali melalui produksi air, erosi dan sedimen. Perubahan

penggunaan lahan yang umum terjadi adalah berubahnya penggunaan lahan hutan dan pertanian menjadi areal terbangun terutama permukiman. Penggunaan lahan adalah hasil interaksi antara aktivitas manusia terhadap satu bidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik langsung ataupun tidak langsung (Dulbahri, 1998). Menurut Warsono, dkk (2009), faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan kelompok permukiman yang menyebar tidak teratur sebagai bentuk lingkungan perumahan adalah faktor persaingan memperoleh lahan.

f) Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan terhadap DAS

Perubahan tutupan lahan sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan akan mempengaruhi sistem tata air DAS. Fenomena ini ditunjukkan oleh karakteristik hidrologi DAS yang dapat dikenali melalui produksi air, erosi dan sedimen (Seyhan, 1999). Viessman et al. (1977), menyatakan secara umum perubahan penggunaan lahan akan mengubah (1) karakteristik aliran puncak (*peak flow*), (2) jumlah aliran permukaan, (3) kualitas air, dan (4) sifat hidrologi daerah bersangkutan. Perubahan hutan menjadi lahan pertanian maupun permukiman menyebabkan hilangnya vegetasi penutup permukaan dan berkurangnya daerah yang dapat meresapkan air. Dengan demikian, peresapan air ke dalam tanah (infiltrasi) menjadi rendah sehingga simpanan air bawah tanah berkurang yang dapat menyebabkan terjadinya kekeringan pada musim kemarau terjadinya kelebihan air atau banjir di permukaan pada musim hujan. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi akan mempengaruhi struktur tanah, permeabilitas tanah, kemantapan agregat yang berimplikasi pada penurunan laju dan kapasitas infiltrasi tanah serta dapat meningkatkan laju erosi (Arwindrasti, 1997). Ramdan (1999) menambahkan bahwa perubahan penggunaan lahan akan mempengaruhi limpasan dan fluktuasi debit dari DAS atau subDAS.

Perubahan dalam pola tata guna lahan akan mengakibatkan perubahan lingkungan hidup, karena tanah dan air merupakan salah satu komponen ekosistem yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan komponen lainnya dalam ekosistem di suatu wilayah (Talkaputra, 1979). Menurut Asdak (2010), perubahan sifat aliran sungai yang terjadi adalah peningkatan koefisien aliran permukaan yaitu terjadinya peningkatan jumlah air hujan yang menjadi aliran permukaan sehingga meningkatkan debit sungai. Peningkatan debit puncak akan merubah bentuk hidrograf secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan respons hidrologi akibat perubahan penggunaan lahan juga dapat dilihat dari rasio antara debit maksimum dan debit minimum suatu sungai (Prastowo, 2003).

2.4.3 Asesmen

a) Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah terkait dengan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang adalah sebagai berikut:

1) Kapasitas Sungai menurun untuk menampung air

Kapasitas tampungan sungai merupakan kemampuan sungai untuk mengalirkan aliran air. Apabila kapasitas tampungan sungai tidak mampu lagi mengalirkan debit air, maka akan terjadi luapan pada sungai dan menyebabkan genangan pada daerah bantaran banjir. Pengurangan kapasitas tampungan sungai dapat disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai tersebut. Debit Curah Hujan yang tinggi mengakibatkan daerah rendah seperti Kelurahan Rancanumpang terutama RW 01 dan RW 02 mengalami banjir karena sungai yang kekurangan dalam menampung debit air yang tinggi. Kapasitas Sungai inilah yang menjadi masalah Ketika curah hujan tinggi datang.

2) Pemeliharaan Drainase

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat lain, misalnya wadah air, baik yang alamiah maupun buatan. Untuk itu, diperlukan sistem drainase yang baik, khususnya di kawasan yang ramai penghuni seperti perumahan maupun perkampungan. Drainase lahan, drainase kota dan pengembangan lahan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mempengaruhi kemampuan menampung debit air yang tinggi. Dengan kondisi drainase yang tidak mengalir dengan baik, maka pada saat turun hujan air dari saluran drainase meluap hingga permukaan tanah, sehingga menyebabkan genangan air bahkan terjadinya banjir. Drainase sebagai sistem pengaliran air menjadi terhambat dan terganggu oleh tumpukan sampah. Perlunya normalisasi serta perbaikan drainase agar aliran air dapat mengalir dengan normal. Apalagi di kondisi cuaca saat ini sering terjadi hujan, tentunya saluran drainase harus baik agar dapat mengurangi genangan air.

3) Penyumbatan Sungai Akibat Sampah

Kegiatan manusia sehari-hari secara tidak langsung telah menambah jumlah sampah di lingkungan perairan, seperti pembuangan sisa kegiatan rumah tangga seperti sampah dapur, kemasan makanan dan/atau minuman ke perairan. Pengelolaan sampah harus mendapatkan perhatian yang lebih banyak seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sebab sampah berperan besar terhadap pendangkalan dan penyempitan saluran drainase dan juga sungai. Pendangkalan dan penyempitan menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung debit air sehingga muncul genangan atau bahkan banjir. Di lapangan masih sering ditemui kantong-kantong plastik berisi sampah

yang dijatuhkan atau dilemparkan dari atas jembatan atau dari permukiman yang ada di sepanjang bantaran sungai.

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh praktikan, berikut merupakan beberapa penyebab yang ditimbulkan dari adanya masalah terkait Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang:

(1) Adanya Pedangkalan Sungai

Kerusakan DAS karena pedangkalan sungai oleh endapan lumpur merupakan masalah yang kompleks. Awalnya adalah kerusakan hutan di daerah hulu sungai menyebabkan tidak ada lagi akar pohon yang mampu menahan tanah agar tidak tererosi ketika hujan terjadi. Pedangkalan sungai terjadi karena adanya pengendapan padatan yang terbawa oleh arus sungai berupa sampah dan yang terutama partikel tanah akibat erosi yang berlebihan yang terjadi di hulu sungai.

(2) Deforestasi Daerah Aliran Sungai

Deforestasi ditafsirkan sebagai situasi hilangnya tutupan lahan dan atribut-atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Akibat dari deforestasi terjadinya pengurangan luas hutan, tingginya potensi terjadi bencana hidrometeorologi, kehilangan berbagai jenis flora dan fauna, dan kerusakan sistem sumber daya air. Deforestasi terjadi dibagian hulu sungai yang akan sangat berdampak kepada permasalahan sungai yang ada dibagian hilir yang dapat memberikan efek jangka Panjang pada penghidupan disekitar sungai bagian hilir.

(3) Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah harus mendapatkan perhatian yang lebih banyak seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sebab sampah berperan besar terhadap pedangkalan dan penyempitan saluran drainase dan juga sungai. Pedangkalan dan penyempitan menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung debit air sehingga muncul genangan atau bahkan banjir.

2) Dampak Masalah

Dampak dari masalah terkait Daerah Aliran Sungai adalah sebagai berikut:

(1) Munculnya Bencana Banjir

Buruknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Menjadi Pemicu Terjadinya Bencana Banjir. Memasuki musim hujan bencana banjir dan longsor terus meningkat. hal ini tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana karena bencana bisa terjadi sewaktu waktu tanpa diprediksi. Banjir yang terjadi dikarenakan Daerah Aliran Sungai yang sudah

berfungsi tidak semaksimal mungkin. Banjir sebagai akibat dari adanya alih fungsi Daerah Aliran Sungai baik dibagian hulu maupun hilir sungai yang akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat disekitar Daerah Aliran Sungai.

(2) Kerusakan Aset Sosial Ekonomi

Daerah Aliran Sungai yang kondisinya kurang baik tentunya akan berdampak pada pemaksimalan kegiatan maupun aset ekonomi sosial dimasyarakat. Aset sosial ekonomi yang akan sangat merasakan dampak akibat dari rusaknya Daerah Aliran Sungai adalah sekolah, kegiatan perdagangan dan lain-lain.

(3) Peningkatan Risiko Penyakit Menular

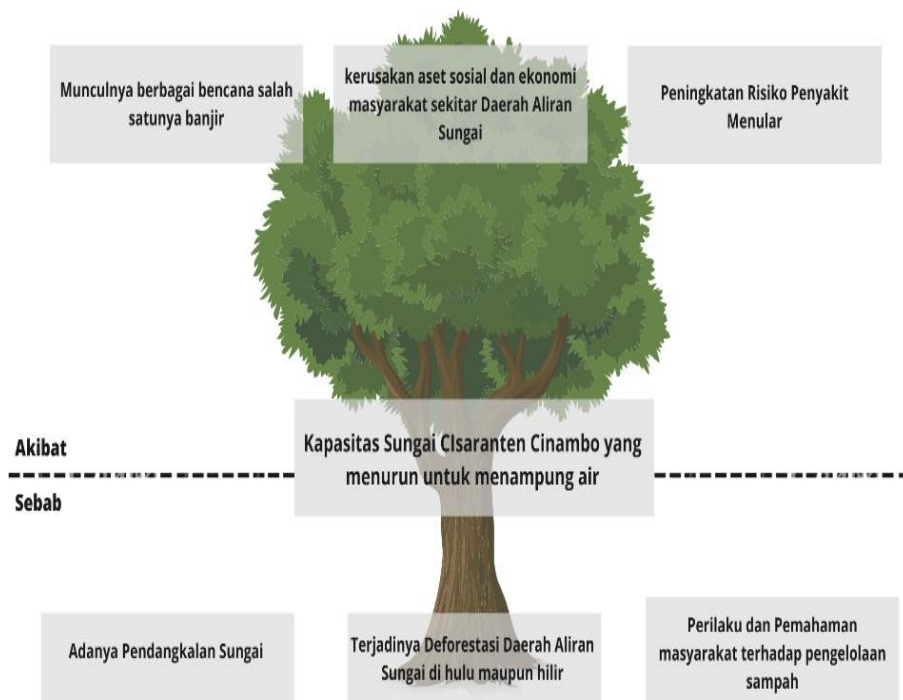
Penyakit Menular adalah penyakit yang disebut juga infeksi; yang dapat menular ke manusia dimana disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit; bukan disebabkan faktor fisik atau kimia; penularan bisa langsung atau melalui media atau vektor dan binatang pembawa penyakit. Daerah Aliran Sungai memiliki fungsi sebagai penyeimbang kondisi Lingkungan. Ketika terjadi kerusakan DAS yang berakibat pada hadirnya bencana maka risiko penyakit menular pun akan meningkat seperti adanya penyakit Demam Berdarah, Diare, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan lain-lain.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka berdasarkan tingkat kemendesakkannya dan luasnya dampak yang dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah Kapasitas sungai yang menurun untuk menampung air dan hal ini membutuhkan penanganan khusus.

4) Analisis Pohon Masalah

Analisis Pohon masalah merupakan suatu alat atau teknik pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa factor yang saling terkait. Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari masalah Fungsi Daerah Aliran Sungai.



Gambar 2.6 Analisis Pohon Masalah Kapasitas Sungai yang menurun untuk menampung air

b) Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat terkait Pengembalian fungsi Daerah Aliran Sungai kepada Masyarakat

Dilakukannya Peningkatan Kapasitas dengan maksud memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan Daerah Aliran Sungai dan fungsinya serta dampak apa saja yang terjadi Ketika Daerah Aliran Sungai menjadi Rusak. Selain itu kegiatan ini bermaksud sebagai upaya perlindungan mata pencaharian masyarakat yang mana masyarakat RW 01 sebagian besar sebagai petani penggarap dengan menjaga irigasi lahan pertanian dan juga sebagai upaya pencegahan bencana akibat rusaknya DAS.

- (2) Pemaksimalan pelaksanaan Regulasi terkait dengan Peningkatan Fungsi Daerah Aliran Sungai

Hal ini dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sehingga dapat tercapainya Fungsi Daerah Aliran Sungai secara maksimal.

c) Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan penjelasan tentang identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian permasalahan terkait dengan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang:

(1) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Dinas Kehutanan memiliki Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai yang tentunya akan sangat berperan dalam pelaksanaan program dan berbagai bentuk kegiatan yang dirancang. Dinas Kehutanan melakukan pelaksanaan tugas-tugasnya terkait dengan berbagai hal seperti Pelaksanaan Pengelolaan DAS, penyiapan materi penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS sampai kepada monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan DAS. Berbagai hal ini akan dilakukan secara maksimal dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, Pemerintah daerah serta LKK yang ada.

(2) Dinas PUPR Kota Bandung

Dinas PUPR berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam penyehatan Lingkungan yang mendukung fungsi Daerah Aliran Sungai melalui pembangunan yang ada di Kelurahan Rancanumpang. Pembangunan dapat berupa Penyediaan Drainase yang memumpuni dan lain-lain. Proses perencanaan pembangunan melalui usulan yang dimulai dari masyarakat, pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan, LSM dan internal pemerintahan, lalu ke Dinas PUPR yang dibahas di Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang biasanya dilakukan setahun sekali. Hasil dari Musrenbang akan diajukan dan dibahas Dinas PUPR ke dan/atau bersama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan). Lalu hasil dari keputusan dibahas bersama panitia anggaran (SEKDA, BAPPEDA, penyusun program Dinas PUPR). Kemudian dibuat skala prioritas program yang menghasilkan keputusan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Selanjutnya RKA diajukan oleh Sekda ke DPRD untuk disaring kemudian ditetapkan dan disahkan dalam anggaran daerah.

(3) Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial memiliki peran dalam Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DAS hulu sekitar hutan dan sekitar sumber air, sehingga aktif berperan ikut menjaga kelestarian hutan dan sumber air secara berkelanjutan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat DAS hulu sekitar hutan dan sekitar sumber air melalui pendampingan usaha ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan, intervensi demografi dan daya dukung lahan, inventarisasi aset dan akses distribusi lahan. Hal ini akan berfokus pada pemaksimalan fungsi DAS di hulu sehingga meminimalisir dampak buruk rusaknya fungsi DAS di hilir.

(4) Pemerintah Kelurahan Rancanumpang

Pemerintah Kelurahan Rancanumpang akan melakukan berbagai kegiatan yang akan berdampak dengan masyarakat di Kelurahan Rancanumpang. Pemerintah Kelurahan Rancanumpang akan mendampingi serta memberikan Peningkatan pengetahuan pentingnya Fungsi Daerah Aliran Sungai bagi masyarakat terutama masyarakat daerah hilir yang akan sangat berdampak pada berbagai bidang kehidupan mereka. Selain itu, Pemerintah Kelurahan Rancanumpang menjadi pihak yang akan sangat terlibat dalam pengusulan penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pemaksimalan fungsi DAS melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang ditujukan pada dinas terkait.

(5) GOBER

Tim GOBER (Gorong-gorong dan Kebersihan) menjadi lini yang akan sangat berperan dalam pemaksimalan kebersihan Lingkungan terutama pemeliharaan drainase di Kelurahan Rancanumpang sehingga dapat memaksimalkan fungsi Daerah Aliran Sungai. Sebagaimana tugas utama dari gober adalah membersihkan sampah di setiap Kelurahan seperti di taman, jalan, selokan dan selokan jalan.

(6) Pekerja Sosial

Pekerja Sosial sebagai Inisiator serta penyuluh bagi terlaksananya program serta berbagai kegiatan yang akan dilakukan seperti penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan optimalisasi fungsi Daerah Aliran Sungai. Selain itu, Pekerja Sosial dapat menjadi *advocator* dalam pengoptimalisasian Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan secara maksimal di lapangan sehingga dapat mencegah dan mengatasi Daerah Aliran Sungai yang rusak fungsinya.

(7) Karang Taruna & Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kedua Lembaga ini akan berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya fungsi Daerah Aliran Sungai dan sebagai contoh bagi masyarakat agar masyarakat dapat melihat secara langsung serta menerapkan sikap dan perilaku yang mengedepankan Lingkungan sehingga dapat mendukung Optimalisasi Fungsi Daerah Aliran Sungai.

2.4.4 Rencana Intervensi

a) Latar Belakang

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sehingga dapat disimpulkan Pengelolaan sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan/pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak sungai Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan Dalam hal manajemen pengelolaan sungai tentunya tidak terlepas dari konsep pengelolaan DAS yang merupakan bagian dari satu kesatuan sistem pengelolaan.

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah sungai sangat besar fungsi sungai yang beranekaragam dengan pemanfaatan sungai sangat berpengaruh terhadap kondisi sungai tersebut. Perubahan dan kerusakan lingkungan di wilayah sungai akan dapat mempengaruhi kelangsungan aktivitas yang memanfaatkan sungai tersebut. Manfaat keberadaan sungai dapat di bagi 2 (dua) yaitu :

1. Untuk kehidupan manusia, sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
2. Untuk Kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah sungai sangat besar fungsi sungai yang beranekaragam dan pemanfaatan sungai sangat berpengaruh terhadap kondisi sungai tersebut. Perubahan dan kerusakan lingkungan di wilayah sungai akan dapat mempengaruhi kelangsungan aktivitas yang memanfaatkan sungai tersebut. Wilayah Sungai disamping mempunyai potensi yang cukup besar juga mempunyai permasalahan an yang cukup banyak. Permasalahan tersebut diantaranya adalah permasalahan fisik, permasalahan hukum (kebijakan), permasalahan sumberdaya manusia dan permasalahan institusi dan permasalahan lingkungan.

Oleh karena itu, praktikan membentuk suatu program guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemeliharaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan **“Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”**

b) Tujuan umum dan khusus

(1) Tujuan Umum

Tujuan diadakannya “**Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**” adalah Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki Kapasitas dalam memaksimalkan Fungsi Daerah Aliran Sungai.

(2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari program “**Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**” adalah:

1. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki pengetahuan terkait Daerah Aliran Sungai
2. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memahami langkah-langkah menjaga Lingkungan agar terciptanya fungsi DAS secara maksimal
3. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi
4. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang terhindar dari berbagai dampak negatif rusaknya Daerah Aliran Sungai

c) Bentuk Kegiatan dan Program

Program dan Kegiatan terkait dengan “**Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**” dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penyuluhan Sosial Pengembalian fungsi Daerah Aliran Sungai kepada masyarakat

Dilakukannya Penyuluhan dengan maksud memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan Daerah Aliran Sungai dan fungsinya serta dampak apa saja yang terjadi Ketika Daerah Aliran Sungai menjadi Rusak. Selain itu kegiatan ini bermaksud sebagai upaya perlindungan mata pencaharian masyarakat yang mana masyarakat RW 01 sebagian besar sebagai petani penggarap dengan menjaga irigasi lahan pertanian dan juga sebagai upaya pencegahan bencana akibat rusaknya DAS.

2. Pendampingan Sosial

Pendampingan Sosial dilakukan sebagai lanjutan dari Sosialisasi dan pemberian pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memelihara Daerah Aliran Sungai demi menunjang Kesejahteraan Sosial masyarakat Kelurahan Rancanumpang. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang akan didampingi dalam Peningkatan kesadaran terkait dengan fungsi Daerah Aliran Sungai.

Tabel 2.21 Bentuk Kegiatan Program Sosialisasi Fungsi DAS

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Sosialisasi Pengelolaan DAS	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki	Pekerja Sosial	Lurah	1 hari	Kelurahan Rancanumpang
Pendampingan Sosial Pengelolaan Fungsi DAS	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang	Kapasitas dalam memaksimalkan Fungsi Daerah Aliran Sungai.	Pekerja Sosial	Lurah	1 hari	Kelurahan Rancanumpang

d) Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam program Optimalisasi Fungsi Daerah Aliran Sungai. Sistem partisipan terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam program Optimalisasi Fungsi Daerah Aliran Sungai, telah ditentukan sistem partisipan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.22 Sistem Partisipan Program Penyuluhan Fungsi Daerah Aliran Sungai

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	Initiator System Pihak yang mengkoordinasikan perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial
2	Change Agent System Seseorang/organisasi/lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan atau pemecahan masalah	Pekerja Sosial
3	Client System Penerima manfaat primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Kelurahan Rancanumpang
4	Support System Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan atau bantuan dalam rangka penyelesaian masalah	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dinas PUPR Dinas Sosial Pemerintah Kelurahan Rancanumpang
5	Controlling System Seseorang/lembaga yang berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menyetujui adanya perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dinas Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
6	Implementing System Staff atau volunteer yang bertugas untuk melaksanakan intervensi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas PUPR • Pemerintah Kelurahan Rancanumpang
7	Target System Pihak yang harus diubah agar tujuan intervensi masyarakat dapat tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Kelurahan Rancanumpang • Pemerintah Daerah
8	Action System Seseorang/organisasi/lembaga yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kelurahan Rancanumpang • Pekerja Sosial • Tim GOBER

e) Metode dan Teknik

(1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah “*community organization* dan *community development*”. Metode ini digunakan untuk membantu masyarakat agar mampu secara mandiri untuk memobilisir dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada secara mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar masyarakat dapat mengetahui dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

(2) Teknik

Teknik pekerjaan sosial merupakan sekumpulan gagasan yang sengaja dibuat untuk membantu pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial kepada klien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teknik yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, dan edukasi baik secara lisan maupun tulisan. Teknik penyuluhan sosial digunakan untuk mengedukasi sasaran, menyampaikan persepsi, dan meyakinkan sasaran. Penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran agar mereka mampu menerima apa yang akan dilakukan dan bersedia terlibat secara aktif. Penyuluhan Penyuluhan/pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan mengelola Lingkungan. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang merupakan Masyarakat pelaku pemberdayaan dalam penegelolaan DAS. Manfaat dari sosialisasi masyarakat tentang pengelolaan sub aliran sungai di sekitar wilayah Rancanumpang diketahui bahwa hutan mampu

berpengaruh terhadap kondisi lingkungan serta mampu mencegah terjadinya bencana alam, serta diketahui ternyata tingginya eksploitatif terhadap hutan disekitar aliran sungai dapat mengancam kelestarian kawasan itu sendiri.

2. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan stakeholder dan menumbuhkan ide serta program. Hal ini nantinya akan digunakan sebagai medium untuk mengembangkan potensi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Sedangkan pendampingan sosial merupakan proses yang dijalankan oleh para pendamping sosial dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat. Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan penerima manfaat yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan fasilitas pelayanan publik lainnya

f) Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Malalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang dimana untuk merealisasikan program Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Malalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Malalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Malalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang. Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.23 Rencana Anggaran Biaya Program Penyuluhan Fungsi Daerah Aliran Sungai

No	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Persiapan	ATK	5 paket	Rp.7.000	Rp.39.600
		Kertas plano	5 lembar	Rp.650	Rp. 3.250
		Hvs	1 rim	Rp. 40.000	Rp.40.000
		Snack	10 box	Rp. 5.000	Rp. 50.000
		Jumlah			
2.	Pelaksanaan	ATK	25 paket	Rp. 6.000	Rp. 150.000
		Modul	25 eksemplar	Rp. 15.000	Rp. 375.000
		HVS	1 rim	RP. 40.000	Rp. 40.000
		Spanduk	2 lembar	Rp. 40.000	Rp. 80.000
		Snack peserta	30 box	Rp. 5.000	Rp. 150.000
		Snack panitia	10 box	Rp. 5.000	Rp. 50.000
		Snack pemateri	5 box	Rp. 7.000	Rp. 35.000
		Proyektor	1 buah	Rp. 300.000	Rp. 300.000
		Honor pemateri	5 orang	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca pelaksanaan	ATK	5 paket	Rp.6.000	Rp. 30.000
		Bahan computer	1 paket	Rp. 175.000	Rp. 175.000
		Kertas plano	5 lembar	Rp. 650	Rp. 3.250
		Snack	10 box	Rp. 7.000	Rp. 70.000
		Jumlah			
4.	Dana darurat				Rp.500.000
Jumlah					Rp. 3. 091.100

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan program Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam program Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang

Tabel 2.24 Alat dan Bahan Program Penyuluhan Fungsi Daerah Aliran Sungai

DAFTAR PERALATAN	DAFTAR BAHAN
komputer / laptop	Kertas HVS
Proyektor	Alat tulis
Mikrofon	Taplak meja
Speaker	Tinta printer
Meja	
Kursi	
Printer	

g) Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat factor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan factor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT praktikan gunakan untuk menguji kelayakan Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Malalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang. Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Malalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh *alternative* ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif *defensive* dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Analisis SWOT dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.25 Analisis SWOT Program Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

	<p>Kekuatan(S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Sumber daya manusia pelaksana program 2) Memiliki materi yang dibutuhkan dan sesuai substansi masalah 	<p>Kelemahan(W):</p> <p>Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</p>
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Paradigma pengelolaan DAS yang multi sektoral 2) Stakeholder yang terlibat cukup banyak 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memaksimalkan Kerjasama antar stakeholder 2) Memaksimalkan pembuatan materi penyuluhan yang menarik 	<p>Strategi WO</p> <p>Meningkatkan fungsi stakeholder dalam melakukan persuasi kepada sasaran</p>
<p>Ancaman (T):</p> <p>Keterbatasan Anggaran Pelaksanaan Program</p>	<p>Strategi ST</p> <p>Membentuk Forum DAS yang berbasis masyarakat dalam upaya pencapaian tujuan program</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Memaksimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada</p>

h) Jadwal dan Langkah-langkah

1) Langkah-langkah

1. Langkah –Langkah

A. Kegiatan Penyuluhan

Berikut adalah langkah –langkah kegiatan Penyuluhan Optimalisasi Fungsi Daerah Aliran Sungai melalui Peningkatan Pengetahuan di Kelurahan Rancanumpang:

a. Pra-Pelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilaksanakan selama 1 hari. Adapun rincian kegiatan pada tahap pra pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk kepanitiaan
- b) Mengidentifikasi peserta kegiatan
- c) Mengidentifikasi narasumber
- d) Menyusun materi kegiatan
- e) Menentukan lokasi kegiatan
- f) Mempersiapkan saran dan prasarana

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 1 hari, berlokasi di Aula Kelurahan Rancanumpang. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan:

- a) Pembukaan
- b) Pemaparan materi
- c) Ice breaking
- d) Demonstrasi dan praktik Pengelolaan DAS (Pengelolaan Sampah, Simulasi Pemaksimalan Lahan Hijau dan simulasi pengendalian air)

e) Penutupan

c. Pasca Pelaksanaan

- a) Pendampingan masyarakat
- b) Penyusunan laporan kegiatan

2) Jadwal Kegiatan

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kelurahan Rancanumpang.

Tabel 2.26 Jadwal Pelaksanaan Program Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	09.00 – 09.30	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Pemerintah Kelurahan
2.	09.30-11.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Fungsi Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Dampak jika DAS rusak terkhusus pada daerah hilir	Dinas Kehutanan & Dinas PUPR
3.	11.00-11.20	Ice breaking	Sie. Acara	Games	Sie. Acara
4.	11.20-12.15	Ishoma			
5.	12.15-13.30	Pemaparan materi	Sie. Acara	Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang DAS Demonstrasi Pengelolaan DAS	Dinas Dinas Kehutanan & Dinas PUPR
6.	13.30-14.15	Pemaparan Materi	Sie. Acara	Cara Pelestarian Lingkungan dengan Peningkatan ekonomi	Dinas Sosial
7.	14.15-14.45	Diskusi	Sie. Acara	Tanya jawab	
8.	14.45-14.50	Penutupan	Sie. Acara	Foto bersama	-

2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK SADAR BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RANCANUMPANG

2.5.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut data World Bank, Indonesia menempati peringkat ke 12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Diperkirakan lebih dari 40 persen penduduk Indonesia terancam dengan adanya risiko ini. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia didasarkan pada kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada waktu yang lalu, penanggulangan bencana dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan kerja yang terkait. Dalam kondisi tertentu, seperti bencana dalam skala besar pada umumnya pimpinan pemerintah pusat/daerah mengambil inisiatif dan kepemimpinan untuk mengkoordinasikan berbagai satuan kerja yang terkait. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana di Indonesia baik melalui mitigasi ataupun kesiapsiagaan bencana. Diperlukan strategi dan program dalam penanganan berbagai bencana di Indonesia dengan berdasar kepada asesmen yang dilakukan daerah tersebut.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/kota di Indonesia, Kota Bandung berada di urutan 127 dengan skor 161,89 dengan kategori tinggi (BNPB,2021). Selain itu, kondisi topografi yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan membuat Provinsi Jawa Barat memiliki ancaman bencana yang bervariasi dengan Titik terendah berada di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage dengan ketinggian 666 m dpl. Secara umum wilayah ini terletak pada daerah dataran tinggi dengan iklim tropis basah dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan Kota Bandung memiliki potensi bencana dengan kerentanan cukup besar akibat faktor hidrometeorologi. Secara umum, permasalahan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Bandung harus dapat diselesaikan secara tuntas, jika tidak, hal tersebut dapat diprediksikan semakin meningkat baik dari segi

kekuatan, pengulangan, dan penyebarannya. Oleh karena itu, paradigma penanggulangan bencana harus terus diperbaharui agar dapat mengatasi masalah secara tepat.

2.5.2 Tinjauan konsep

a) Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
- 4) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008

b) Bencana Banjir

Definisi bencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi; permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut; wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air; pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai; aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah; serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah "bukan langganan banjir". Setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini.

Banjir di defenisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilaah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (IDEP,2007). Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah

rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air.

Daerah rawan banjir adalah daerah yang sering dilanda banjir. Daerah tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan geomorfologi khususnya aspek morfogenesis, karena kenampakan seperti teras sungai, tanggul alam, dataran banjir, rawa belakang, kipas aluvial, dan delta yang merupakan bentukan banjir yang berulang-ulang yang merupakan bentuk lahan detil yang mempunyai topografi datar.

c) **Penanggulangan Bencana Banjir**

Dalam buku manajemen bencana (Nurjanah dkk: 2012) Kebijakan penanggulangan bencana dapat berupa peraturan Kepala BNPB, Peraturan Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tentang penanggulangan penyelenggaraan bencana diantaranya mengatur tentang berbagai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semua fase/ tahapan dijelaskan sebagai berikut:

a) Pra Bencana

Meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana,

kegiatan yang dilakukan adalah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

b) Saat Bencana

Meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena kebutuhan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana.

c) Pasca Bencana

Setelah selesainya diharapkan terjadi masa korban pengungsi (jika ada pengungsi) kembali ke rumah/ tempat asal di mana mereka tinggal. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan penghidupan mereka dapat berjalan kembali. Ini berlaku untuk korban bencana/ pengungsi yang bisa kembali ke tempat semula di mana mereka tinggal. Dalam hal tidak memungkinkan untuk kembali, bisa ditempuh jalan lain misalnya melalui relokasi ke tempat lain yang aman secara fisik maupun non-fisik.

d) **Kesiapsiagaan Bencana Banjir**

Dalam menanggulangi banjir bukan hanya pada pasca banjir saja, namun juga dilakukan pra bencana dan saat terjadi bencana. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat. Adanya ini keterlibatan bertujuan meminimalisir risiko bencana banjir. Pada siklus manajemen bencana (Carter, 1991), kesiapsiagaan masuk dalam kategori pra bencana. Kesiapsiagaan ini biasanya muncul karena secara psikologis pernah mengalami bencana tersebut. Kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan menjadi elemen penting yang bersifat pro aktif sebelum terjadinya suatu bencana (Noor, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berdaya guna. Sistem tanggap bencana atau manajemen bencana (disaster management) adalah sebuah pendekatan yang sistematis dan sinergis dari berbagai pihak dalam mengantisipasi dan atau menangani suatu bencana. Adanya upaya kesiapsiagaan bencana merupakan langkah preventif untuk meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan.

Kesiapsiagaan lebih ditujukan untuk menghadapi kondisi sesaat setelah bencana dan upaya pemulihan kembali ke kondisi normal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahap kesiapsiagaan ini diantaranya

mempersiapkan diri untuk melakukan pertolongan pertama setelah terjadi bencana, bagaimana melakukan koordinasi dalam kondisi tanggap darurat, serta bagaimana melakukan evakuasi dari daerah yang terkena bencana ke daerah yang aman.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana diantaranya adalah:

- a) Pelatihan mengenai bagaimana menyelamatkan diri sendiri dan orang di sekitar kita saat terjadi bencana.
- b) Koordinasi antara pihak-pihak terkait, siapa melakukan apa saat keadaan darurat, serta evakuasi ke tempat aman.
- c) Menyiapkan perlengkapan darurat saat terjadi bencana.
- d) Bagaimana memberikan pertolongan pertama pada orang yang terluka saat terjadi bencana.
- e) Upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan secara cepat, terutama pemulihan mental.

2.5.3 Asesmen

a) Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah terkait dengan Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang adalah:

- 1) Minimnya Wawasan dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesiapsiagaan Bencana

Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sangat diperlukan. Terutama dalam tahap kesiapsiagaan bencana, tetapi di lapangan masih ditemukan masyarakat yang tidak memahami apa itu kesiapsiagaan bencana dan potensi bencana yang ada di lingkungannya. Karena ketidaktahuan tersebut masyarakat tidak memiliki dorongan untuk berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan bencana yang sudah direncanakan pemerintah setempat. Berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilihat dan dilakukan ketika terjadi bencana yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk keterampilan, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang. Kesemua bentuk partisipasi ini belum dilaksanakan di Kelurahan Rancanumpang.

- 2) Lemahnya Koordinasi Antar Instansi Terkait

Selama ini penanggulangan bencana alam belum terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan lambatnya penanganan bencana di Indonesia. Kurang sigapnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat salah satunya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga yang mendapat mandat penanggulangan bencana seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain-lain terhadap penanggulangan bencana. Lemahnya koordinasi antara pusat dan

daerah disebabkan BNPB sebagai lembaga penggerak dari pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam berkoordinasi dengan daerah. Mengingat, BNPB tidak memiliki jalur komando langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Apalagi, BPBD secara kelembagaan berada di bawah kepala daerah, sedangkan peran BNPB hanya sebatas pembinaan teknik. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan kalau BNPB dan BPBD sebagai unsur pelaksana penanganan bencana, mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan sekaligus

3) Tidak Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Sarana dan prasarana seperti mobil patrol, tenda pengungsian, alat deteksi bencana dan alat lainnya yang diperlukan untuk penanggulangan bencana, masih belum dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya anggaran daerah untuk kebencanaan, baik pra bencana, saat bencana ataupun pasca bencana.

4) Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Dalam Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana sistem pelayanan public sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan informasi. Tetapi dalam hal kebencanaan masih kurang adanya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat untuk mengakses pelayanan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya koordinasi penyedia pelayanan dengan pemerintah atau pelayanan tersebut sulit diakses langsung oleh masyarakat

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh praktikan, berikut merupakan beberapa penyebab yang ditimbulkan dari adanya masalah Penanggulangan Bencana Banjir yaitu:

(1) Kurang Sosialisasi terkait Kesiapsiagaan Bencana Banjir

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap karakteristik bencana dan risikonya, kurangnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang terjadi di sekitarnya, dan belum adanya pelatihan secara terpadu dan periodik.

(2) Sikap Masyarakat yang cenderung pasrah saat terjadi bencana

Masyarakat, relawan, petugas keamanan dan aparaturnya hingga di tingkat desa adalah aset terbesar SDM ketika bencana terjadi, merekalah yang terdekat dengan lokasi dan mampu memberi bantuan paling cepat. Ketika mereka sebagai sektor terdekat tidak dapat melakukan kesiapsiagaan bencana maka risiko kerugian akan makin tinggi. Di Indonesia, sikap fatalistik dalam bencana bahkan bukan hanya ditujukan pada bencana yang disebabkan oleh alam. Dengan pandangan fatalisme tersebut menjadikan masyarakat menjadi pasrah akan nasib. Masyarakat menganggap bencana alam sebagai takdir yang tidak bisa dihindarkan dan di kurangi risikonya

(3) Minimnya anggaran penanggulangan bencana

Tahap pra bencana terkhusus pada Kesiapsiagaan masih sering diabaikan oleh pemerintah karena pemerintah berfokus pada paradigma yang menekankan pada aspek tanggap darurat dan pembiayaan yang bersifat reaktif. Sehingga seringkali di daerah tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi dan kegiatan kesiapsiagaan bencana lainnya.

(4) Bencana Banjir tidak dianggap masalah yang urgensinya tinggi

Pandangan Masyarakat masih secara konvensional. Masyarakat menganggap bahwa bencana merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Bencana dianggap sebagai takdir (musibah atau kecelakaan). Karena dianggap sebagai takdir berupa musibah/kecelakaan, maka bencana tidak dapat diprediksi karena tidak menentu datangnya dan tidak dapat dihindari serta dapat dikendalikan. Oleh karena itu masyarakat sering kali mengabaikan tahapan penanggulangan bencana terutama saat pra bencana salah satunya adalah kesiapsiagaan.

2) Dampak Masalah

Dampak dari masalah terkait Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang adalah sebagai berikut:

(1) Masyarakat tidak siap jika terjadi bencana banjir

Dalam Kesiapsiagaan bencana masyarakat diarahkan untuk mempersiapkan diri dan materi untuk menghadapi bencana. Tetapi jika kesiapsiagaan bencana tidak dilaksanakan maka masyarakat tidak siap secara mental dan materi. Masyarakat akan terkejut dan panik karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi.

(2) Meningkatnya kerugian material (rumah rusak dll)

Kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat terjadinya sebuah bencana tentunya akan mengakibatkan kerugian finansial. Rumah, 95 teknik dan

infrastruktur yang rusak memerlukan 96eknik96n dana untuk perbaikan. Selain perbaikan fisik, perbaikan mental korban bencana juga memerlukan biaya 96eknik96n yang cukup banyak. Ketidaktahuan masyarakat terhadap potensi bencana di daerahnya mengakibatkan terbangunnya bangunan-bangunan yang tidak tahan gempa. Dengan dibangunnya rumah, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya tanpa mempertimbangkan potensi bencana, akan meningkatkan angka kerusakan bangunan dan infrastruktur.

(3) Meningkatnya stress dan trauma pasca bencana

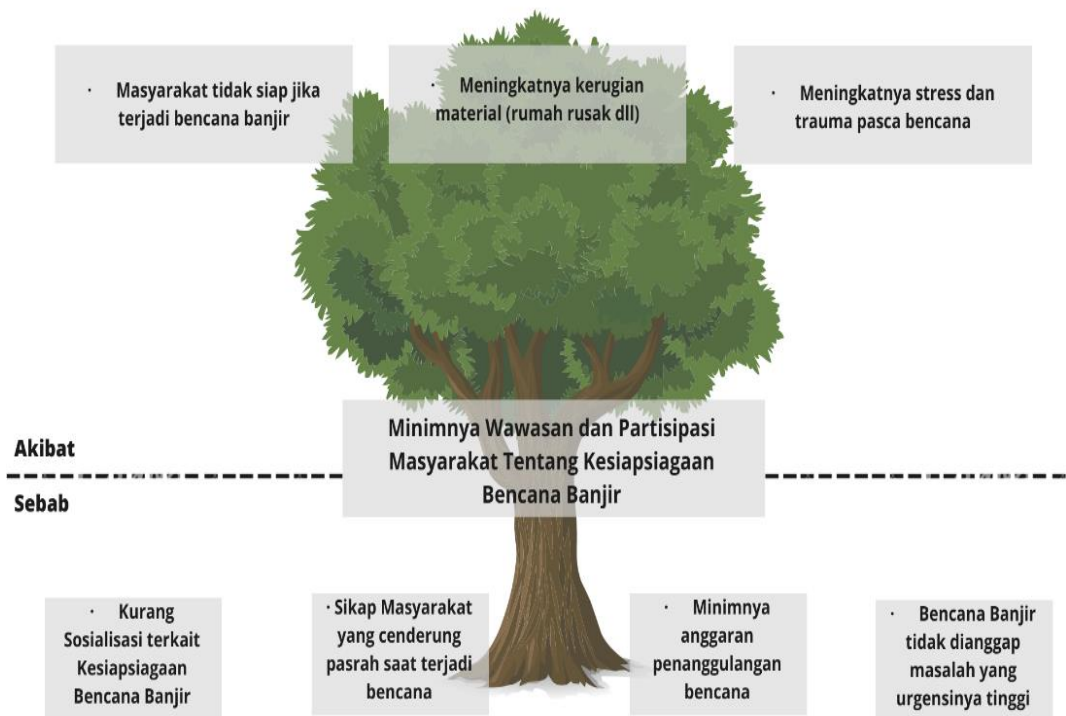
Masyarakat yang tidak memiliki wawasan tentang kesiapsiagaan bencana akan mengalami guncangan mental ringan bahkan sampai trauma, karena kehilangan harta benda atau keluarganya. Selain itu akibat kondisi yang tidak wajar mengakibatkan masyarakat mengeluarkan reaksi-reaksi yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-harinya, seperti marah-marah, diam, menangis, dan reaksi lainnya. Reaksi-reaksi tersebut dapat berlanjut menjadi trauma dalam diri individu jika tidak ditangani dengan baik.

3) Fokus Masalah

Fokus Masalah Berdasarkan identifikasi yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan yaitu Minimnya Wawasan dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesiapsiagaan Bencana Banjir.

4) Analisis Pohon Masalah

Analisis Pohon masalah merupakan suatu alat atau teknik pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa factor yang saling terkait. Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari masalah Minimnya Wawasan dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesiapsiagaan Bencana Banjir.



Gambar 2.7 Analisis Pohon Masalah Minimnya Wawasan & Partisipasi masyarakat tentang kesiapsiagaan banjir

b) Identifikasi Kebutuhan

- 1) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesiapsiagaan bencana banjir

Upaya Peningkatan pengetahuan serta pemahaman harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh yang menjangkau dan memanfaatkan segala potensi sumber sehingga dapat secara berkelanjutan mempengaruhi sikap penanggulangan bencana yang baik.

- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terkait potensi terjadinya banjir

Kecamatan Gedebage terkhusus pada Kelurahan Rancanumpang sebagai titik terendah di Kota Bandung meningkatkan potensi dari bencana banjir. Keadaan ini menyebabkan Ketika debit air hujan tinggi di hulu maka akan sangat berdampak pada daerah hilir terlebih Ketika Daerah Aliran Sungai yang fungsinya sudah kurang maksimal.

- 3) Menyediakan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir

Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

Contohnya peralatan peringatan dini (early warning system) sesuai kondisi dan kemampuan daerah.

c) Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Dalam intervensi permasalahan minimnya wawasan dan partisipasi masyarakat tentang mitigasi bencana adalah sebagai agen perubahan dan pelaksana kegiatan.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu. Dalam intervensi permasalahan minimnya wawasan dan partisipasi masyarakat tentang mitigasi bencana adalah sebagai pelaksana program, narasumber, dan pengawas kegiatan.

3) TAGANA

Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. TAGANA berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan juga berperan dalam pembentukan kelompok sadar bencana banjir dalam hal ini sebagai inisiator Bersama Pekerja Sosial.

4) Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang kebencanaan dinas sosial berperan sebagai penyusun dan penyelenggara program

penanggulangan bencana bersama dengan BPBD dan TAGANA. Dalam intervensi permasalahan minimnya wawasan dan partisipasi masyarakat tentang mitigasi bencana adalah sebagai pengawas dan pelaksana program.

2.5.4 Rencana Intervensi

a) Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, fenomena alam berupa banjir yang menghantam pemukiman penduduk di Kota Bandung terkhusus Kelurahan Rancanumpang dan terjadinya banjir yang menggenangi kawasan lain sering terjadi. Bencana itu menjadi rutinitas tahunan sejalan dengan perubahan iklim yang cukup signifikan. Setidaknya, rentetan kejadian tadi memberikan garis merah untuk ditanggulangi. Salah satu cara meminimalkan dampak kerusakan akibat bencana tersebut dengan menyiapkan siaga bencana di Kota Bandung. Untuk menghindari kerugian yang timbul akibat bencana perlu adanya kesadaran seluruh komponen bangsa terutama pemerintah agar suatu kejadian bahaya tidak menyebabkan bencana bagi warganya.

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam kebencanaan, sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana baik itu tingkat keluarga atau kelompok masyarakat. Disamping itu, keterbatasan kemampuan pemerintah juga menjadi pendorong kemandirian masyarakat untuk siap siaga terhadap bencana. Dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir, maka dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB). Partisipasi masyarakat melalui KSB merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan yang dilakukan di daerah rawan bencana. Kegiatan peningkatan kesiapsiagaan bencana tidak lagi hanya dengan konsep penyuluhan dan sosialisasi semata namun mulai mengajak masyarakat untuk terlibat menjadi bagian dari proses. Oleh Karena itu, Praktikan mengusulkan **“Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang”**

b) Tujuan umum dan khusus

(1) Tujuan Umum :

Program **“Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang”** memiliki tujuan umum yaitu Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki kemampuan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir.

(2) Tujuan Khusus :

Program **“Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang”** memiliki beberapa tujuan khusus antara lain :

1. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana banjir.
2. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang dapat memahami tentang kesiapsiagaan bencana yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko bencana (banjir) yang sering terjadi diwilayahnya.
3. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang dapat merubah sikap dan perilaku untuk selalu sadar bencana banjir.
4. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang dapat meningkatkan kemandirian dalam menghadapi bencana banjir.

c) Bentuk Kegiatan dan Program

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang akan dilaksanakan beberapa bentuk kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat di Kelurahan Rancanumpang yaitu:

1. Penyuluhan Sosial tentang Kesiapsiagaan Bencana Banjir melalui Kelompok Sadar Bencana

Penyuluhan Sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri.

2. Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Banjir

Pelatihan kesiapsiagaan bencana keluarga merupakan kegiatan pelatihan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bencana, respon terhadap bencana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang ada di sekitar mereka.

Tabel 2.27 Bentuk Kegiatan Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Penyuluhan Sosial Kesiapsiagaan Banjir	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki	Pekerja Sosial	Lurah	1 hari	Kelurahan Rancanumpang
Pelatihan Kesiapsiagaan Banjir	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang	kemampuan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir.	Pekerja Sosial	Lurah	1 hari	Kelurahan Rancanumpang

d) Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Bencana di Kelurahan Rancanumpang. Dalam program ini, telah ditentukan sistem partisipan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.28 Sistem Partisipan Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i> Pihak yang mengkoordinasikan perubahan/pemecahan masalah	Pekerja Sosial
2	<i>Change Agent System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengkoordinasikan usaha perubahan atau pemecahan masalah	Pekerja Sosial
3	<i>Client System</i> Penerima manfaat primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Kelurahan Rancanumpang
4	<i>Support System</i> Pihak-pihak lain yang diharapkan memberikan dukungan atau bantuan dalam rangka penyelesaian masalah	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Kelurahan Rancanumpang• BPBD Kota Bandung
5	<i>Controlling System</i> Seseorang/lembaga yang berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menyetujui adanya perubahan dan mengarahkan dalam pengimplementasiannya	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Sosial• BPBD Kota Bandung• Pemerintah Kelurahan Rancanumpang
6	<i>Implementing System</i> Staff atau <i>voullenteer</i> yang bertugas untuk melaksanakan intervensi	<ul style="list-style-type: none">• TAGANA
7	<i>Target System</i> Pihak yang harus diubah agar tujuan intervensi masyarakat dapat tercapa	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Kelurahan Rancanumpang
8	<i>Action System</i> Seseorang/organisasi/lembaga yang mengembangkan perencanaan serta menjadi kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya perubahan melalui penyelesaian tugas-tugas	<ul style="list-style-type: none">• BPBD Kota Bandung• TAGANA• Pekerja Sosial

e) Metode dan Teknik

Metode Utama yang akan dilakukan adalah *Community Development*. *Community development* merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengakumulasi nilai-nilai sosial di masyarakat. Sehingga hal ini merepresentasikan beberapa nilai fundamental, seperti *people centred*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Teknik yang digunakan adalah:

1. Penyuluhan Sosial. Penyuluhan sosial merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, dan edukasi baik secara lisan maupun tulisan. Teknik yang digunakan dalam program ini adalah teknik penyuluhan sosial dimana para sasaran dalam hal ini masyarakat Kelurahan Rancanumpang diberi pemahaman, edukasi dan motivasi terkait kesiapsiagaan bencana.
2. *Focus Group Discussion*. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Melalui FGD akan terbentuk kepercayaan antara pekerja sosial dan masyarakat sasaran karena intensitas komunikasi. Didalam FGD akan membahas Asesmen (menggunakan MPA, Pohon Masalah, Diagram Venn), Penilaian Risiko Bencana dengan Rumus :

$$Risk = \frac{Hazard \times Vulnerability}{Capacity}$$

Selanjutnya akan dilakukan Pembuatan Rencana Tindak Lanjut dari hasil Asesmen yang telah dilaksanakan.

3. Pemetaan potensi. Pemetaan potensi dilakukan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi di daerah tertentu, identifikasi tersebut dapat meliputi identifikasi potensi sektoral sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang ada, dan modal.
4. Pendampingan Sosial. Bermaksud proses relasi sosial dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pencapaian tujuan.

f) Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang dimana untuk merealisasikan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang. Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.29 Rencana Anggaran Biaya Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir

No	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Persiapan	Proposal	2 paket	Rp.7.000	Rp.39.600
		Kertas plano	5 lembar	Rp.650	Rp. 3.250
		Hvs	1 rim	Rp. 40.000	Rp.40.000
		Snack	15 box	Rp. 5.000	Rp. 75.000
		Stiker	25 buah	Rp. 500	Rp. 12.500
		Pamflet	25 buah	Rp. 1.000	Rp. 25.000
		Banner	2 buah	Rp. 175.000	Rp. 350.000
		Jumlah			
2.	Pelaksanaan	ATK	25 paket	Rp. 6.000	Rp. 150.000
		Modul	25 eksemplar	Rp. 15.000	Rp. 375.000
		Snack peserta	2 kali x 20 box	Rp. 5.000	Rp. 200.000
		Snack panitia	2 kali x 10 box	Rp. 500.000	Rp. 100.000
		Snack pemateri	5 box	Rp. 7.000	Rp. 35.000
		Proyektor	1 buah	Rp. 300.000	Rp. 300.000
		Honor pemateri	5 orang	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca pelaksanaan	ATK	5 paket	Rp.6.000	Rp. 30.000
		Bahan computer	1 paket	Rp. 175.000	Rp. 175.000
		Kertas plano	5 lembar	Rp. 650	Rp. 3.250
		Snack	10 box	Rp. 7.000	Rp. 70.000
		Jumlah			
4.	Dana darurat				Rp.200.000
Jumlah					Rp. 3.285.100

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan progam. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang.

Tabel 2.30 Alat dan Bahan Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir

DAFTAR PERALATAN	DAFTAR BAHAN
komputer / laptop	Kertas plano
Proyektor	Kertas HVS
Mikrofon	Alat tulis
Speaker	Taplak meja
Meja	Tinta printer
Kursi	
Printer	
Atribut Pelaksanaan (Banner, Stiker, Pamflet, modul)	

g) Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan factor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT praktikan gunakan untuk menguji kelayakan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang. Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh *alternative* ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif *defensive* dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Analisis SWOT dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.31 Analisis SWOT Pembentukan Kelompok Sadar Bencana Banjir

	Kekuatan(S): 1) Kesadaran Masyarakat terhadap potensi Banjir 2) Adanya kerjasama dengan berbagai pihak	Kelemahan(W): Terbatasnya penyediaan fasilitas fisik
Peluang (O): 1) Pembentukan Tim Kerja 2) Adanya Komunikasi dan Koordinasi yang dibangun	Strategi SO Meningkatkan kerja sama tim dengan pihak-pihak lain agar masalah yang dihadapi dalam penanggulangan bencana berjalan dengan mudah	Strategi WO Meningkatkan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat agar dapat selalu mendukung BPBD Kota Bandung dalam mengatasi bencana
Ancaman (T): Lingkungan Sosial yang mengalami perubahan di masa mendatang	Strategi ST 1) Memanfaatkan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat dengan menggunakan sebaikbaiknya. 2) Meningkatkan kerjasama dengan antar daerah agar penanggulangan dapat diatasi dengan cepat	Strategi WT Memaksimalkan pembentukan KSB dalam membantu dalam penanganan bencana di lapangan

h) Jadwal dan Langkah-langkah

(1) Langkah-Langkah

1. Persiapan

Engagement merupakan suatu periode dimana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya. Hasil Proses Engagement dapat dilihat dari :

- a. Pekerja Sosial merupakan bagian dari situasi
- b. Komunikasi telah terbentuk
- c. Ada persetujuan tentang proses pada tahap selanjutnya.

Tahap intake merupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan penyandang masalah. Dalam Proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh penyandang masalah, pelayanan dapat diberikan oleh pekerja sosial, lembaga sosial dan pemerintah dalam membantu memecahkan masalah. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan penyandang masalah kepada pekerja sosial.

Setelah intake maka harus dibuat seperti perjanjian (kontrak), yaitu adanya kesepakatan bersama mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

(2) Pemetaan Stakeholder

Pemetaan Stakeholder dilakukan dengan menggunakan tools Diagram Venn. Diagram Venn dilakukan dan dibuat dengan bantuan atau partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui Lembaga, Organisasi atau stakeholder terkait yang dapat membantu dalam mengatasi sebuah permasalahan.

Diagram Venn termasuk ke dalam Analisis kelembagaan yang memiliki arti proses untuk membahas lembaga apa saja yang ada di sekitar komunitas, seberapa pentingnya masing-masing lembaga, apa hubungan lembaga tersebut dan siapa yang berpartisipasi di dalamnya. Lembaga dapat berupa sekolah, gereja, masjid, kelompok olahraga, kelompok memancing atau Bertani, koperasi, kelompok perempuan, kelompok pemuda, bisnis atau perusahaan, kantor pemerintah dan berbagai organisasi/lembaga lainnya.

(3) Rapid Assessment

Rapid Assessment yaitu metode untuk menilai atau mengkaji secara cepat. Tujuan diselenggarakannya *Rapid Assessment* yaitu untuk mendapatkan “database” tentang bencana baik penyebab, dampak, hal yang sudah dilakukan untuk menangani dan lain-lain.

2. Pelaksanaan

a. Penyuluhan Sosial

Materi Penyuluhan Sosial terkait Bencana Banjir antara lain :

- 1) Pengertian Banjir
- 2) Jenis Banjir
- 3) Penyebab Banjir
- 4) Penanggulangan Bencana Banjir (Pra Bencana, Saat Bencana, Pasca Bencana)

b. Pelatihan Kesiapsiagaan

Pelatihan Kesiapsiagaan dilakukan dengan harapan masyarakat mampu mengelola ancaman dari bencana yang kerap terjadi di lingkungannya sehingga dapat memperkecil tingkat kerentanan bencana di wilayah ini. Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan dilakukan di Aula Kelurahan Rancanumpang. Pelatihan akan memerlukan beberapa hal seperti alat peraga dan lain-lain.

3. Penutup

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan manajemen peralatan dan mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi melihat manfaat untuk perencanaan selanjutnya. Dalam mengevaluasi latihan, beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan yaitu Apakah peserta memahami tujuan dari latihan?, Siapa saja yang berperan aktif dalam latihan?, Bagaimana kelengkapan peralatan pendukung latihan?, Bagaimana respons peserta latihan?, Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam setiap langkah latihan? Dan Apa hal-hal yang sudah baik, dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki?

Evaluasi yang dilakukan dalam program ini adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir sebuah program, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses program pelatihan telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dari pelatihan. Evaluasi Formatif dilaksanakan secara formal dengan melakukan pengecekan kriteria evaluasi terhadap sasaran.

Kriteria Evaluasi :

- a. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki kompetensi Kesiapsiagaan Banjir
- b. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengurangi resiko bencana (banjir) yang sering terjadi diwilayahnya.
- c. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memiliki sikap sadar akan bencana banjir.

Evaluasi Formatif yang dilakukan akan berbentuk soal yang akan diberikan dan dijawab oleh sasaran pada akhir kegiatan. Contoh soalnya :

Berikut ini yang merupakan tahapan penanggulangan bencana adalah...

- a. Pra-bencana
- b. Tanggap darurat
- c. Pasca-bencana
- d. A – B – C
- e. B – C

Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta pelatihan terhadap materi yang di paparkan dalam materi pokok, gunakan rumus berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah Jawaban Benar}) / (\text{Jumlah Soal}) \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

- 90 - 100 % : baik sekali
- 80 - 89 % : baik
- 70 - 79 % : cukup
- < 70 % : kurang

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.32 Jadwal Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir

Kegiatan Penyuluhan					
No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	09.00 – 09.20	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Kepala Dinas Sosial Perwakilan BPBD Kota Bandung
2.	09.20 – 10.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Potensi Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang	BPBD Kota Bandung
3.	10.00- 10.15	Ice breaking	Sie. Acara	Games	Sie. Acara
4.	10.15- 11.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Urgensi Pembentukan Kelompok Siaga Bencana	BPBD Kota Bandung
5.	11.00 – 11.35	Diskusi	Sie. Acara	Tanya jawab	BPBD Kota Bandung
6.	11.35 – 11.45	Penutupan	Sie. Acara	Foto bersama	-

Kegiatan Pelatihan					
No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	09.00 – 09.20	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	BPBD Kota Bandung
2.	09.20 – 10.00	Pemaparan materi	Sie. Acara	Kesiapsiagaan Bencana banjir	BPBD Kota Bandung
3.	10.00-10.15	Ice breaking	Sie. Acara	<i>Games</i>	Sie. Acara
4.	10.15-11.00	Simulasi	Sie. Acara	Kesiapsiagaan bencana banjir	BPBD Kota Bandung
5.	11.00 – 11.35	Diskusi	Sie. Acara	Tanya jawab	BPBD Kota Bandung

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Praktikum I merupakan praktikum berbasis laboratorium. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial dan memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial yang meliputi pendekatan awal, asesmen dan perencanaan intervensi.

Praktikum Laboratorium dilaksanakan di Kelurahan Rancanumpang Kota Bandung yang dimulai dari 25 Januari 2023. Kegiatan Praktikum dilakukan berdasar pada Lima Profil Lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial dan Analisis Penanggulangan Bencana. Setiap profilnya praktikan diwajibkan untuk mencari isu-isu yang sesuai dengan topik profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data sekunder. Kemudian dilakukan asesmen dan menyusun rencana intervensi dari isu yang dipilih.

Praktik Profil Analisis Jaminan Sosial dimulai pada tanggal 8 Februari 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi. Dalam Profil Analisis Jaminan Sosial, praktikan memilih isu Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Jaminan Sosial praktikan menjadikan Topik Minimnya pengetahuan masyarakat terkait mekanisme pendaftaran dan kriteria PBI-JKN sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen praktikan menyusun rencana intervensi berupa program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terkait PBI-JKN melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang..

Praktik Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial dimulai pada tanggal 22 Februari 2023. Diawali dengan pembekalan dari praktisi praktikan mengambil isu terkait Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar yang kurang sesuai dengan peraturan. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar yang kurang sesuai dengan peraturan, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah,

mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Setelah selesai melakukan asesmen praktikan menyusun rencana intervensi berupa kegiatan sosialisasi, yaitu Peningkatan Pemahaman Orang Tua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar melalui Sosialisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar.

Praktik Profil Analisis Pemberdayaan Sosial dimulai pada tanggal 8 Maret 2023, diawali dengan pemberkalan dari praktisi. Dalam profil pemberdayaan sosial, praktikan mengambil isu terkait Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Pengangguran, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Pemberdayaan Sosial praktikan mengambil Tingginya angka Pengangguran sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa Peningkatan Keterampilan Pengangguran melalui Pelatihan Sablon Distro.

Praktik Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial dimulai pada tanggal 24 Maret 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi. Dalam profil penataan lingkungan sosial praktikan mengambil isu terkait Fungsi Daerah Aliran Sungai. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Fungsi Daerah Aliran Sungai, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial praktikan mengambil fokus masalah yaitu Minimnya Fungsi Daerah Aliran Sungai yang berdampak pada kehidupan Masyarakat di Kelurahan Rancanumpang sebagai titik terendah di Kota Bandung. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa Optimalisasi Fungsi Daerah Aliran Sungai melalui Penyuluhan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Praktik Profil Analisis Penanggulangan Bencana dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023. Diawali dengan pembekalan dari praktisi. Dalam profil analisis penanggulangan bencana, praktikan mengambil isu terkait Kesiapsiagaan Bencana Banjir. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Kesiapsiagaan Bencana Banjir, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Penanggulangan Bencana praktikan mengambil minimnya wawasan dan partisipasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana

banjir sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Masyarakat melalui Kelompok Sadar Bencana Banjir di Kelurahan Rancanumpang.

3.2 Rekomendasi

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Setelah pelaksanaan praktikum laboratorium yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari sampai 15 April 2021. Maka praktikan merasa memiliki beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ataupun ditingkatkan oleh pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial. Berikut ini adalah rekomendasi yang sekiranya dapat dipertimbangkan oleh program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan:

- a) Pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial diharapkan mengkaji ulang pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran kelas.
- b) Pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial diharapkan mengkaji ulang substansi pembekalan agar lebih relevan dengan profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial.

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial

- a) Pihak Politeknik Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat meningkatkan Kerjasama dalam penentuan jadwal sehingga dapat memaksimalkan kondisi Praktikum Laboratorium.
- b) Pihak Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung diharapkan dapat mengutamakan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dalam pemilihan kasus yang ditangani oleh Sentra Layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Eka dkk. 2018. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 4 No. 2.
- Bandungkab.go.id. RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG. Diakses dari <http://www.bandungkab.go.id/uploads/TUPOKSI1.pdf>
- Bpbd.ntbprov.go.id. 2018. Pengertian bencana. Diakses dari https://bpbd.ntbprov.go.id/?q=pengertian_bencana
- BNPB. (2021). *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta : Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Dinas Sosial Kalimantan Barat. (2019). *Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Di Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019*.
- Edi Suharto. (2009). *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Edi Suharto. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Fred, John, 2018. *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme*. Tangerang : CV Margin Kiri.
- Huraerah, Abu, 2011. *Pengorganisasian Dan Pemberdayaan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora Mulyana.
- Kajian Teori. 2020. Teori. Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/65210/3/BAB%20II.pdf>
- Kementerian PUPR RI. (2014). *Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Kurniawan, Lilik dkk. (2011). *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta : BNPB.
- Nasional.kompas.com. 2018. Budaya Sadar Bencana Masyarakat Indonesia. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/26/12145181/budaya-sadar-bencana-masyarakat-indonesia- masih-rendah>

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Profil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia 2019

Rancanumpang, K. (2015). Profil Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage. Diakses dari <https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/profil-kelurahan-rancanumpang-kecamatan-gedebage/>

Rina Nur Azizah. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 18, 203.

Sabir, A., & Phil, M. (2016). Gambaran Umum persepsi masyarakat terhadap bencana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 5(3), 304-326.

Setyowati, DL. (2019). *Pendidikan Kebencanaan*. Semarang: Unnes Journal.

Sholikha, Ebni. (2018). Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh siswa SMPN 2 Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Foundasia*, 9 (1), 55-63.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. JKN : Perjalanan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI; 2015.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Yrahayu077.blogspot.com. (2013, 22 November). Metode COCD dalam Pekerjaan Sosial. Diakses dari <http://yrahayu077.blogspot.com/2013/11/metode-cocd-dalam-pekerjaan-sosial.html?m=1>

Yurikamaha.blogspot.com. (2017, 11 Mei). Kajian Praktik Pekerjaan Sosial Makro. Diakses dari <http://yurikamaha.blogspot.com/2017/05/kajian-praktik-pekerjaan-sosial-makro.html>

LAMPIRAN 1

RESUME PEMBEKALAN

JAMINAN SOSIAL

1. Kebijakan dan Struktur Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Suatu cara penyelenggaraan program jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita skit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pension, meninggal dunia atau kehilangan pekerjaan.

Landasan Filosofis : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3)). Memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3)). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2))

Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)

Dasar Hukum Implementasi Jaminan Sosial:

a. UUD 1945

- Pasal 28 H : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
- Pasal 34 : Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

b. UU No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK

Jaminan bagi tenaga kerja yan diberikan untuk memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja yang pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Program jaminan sosial tenaga kerja diwajibkan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, dan sukarela untuk pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

c. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dasar pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Program Jaminan Sosial dalam SJSN terdapat dua skema yaitu Non Contributory (Penerima Bantuan Iuran) dan Contributory (Non Penerima Bantuan Iuran) dengan bentuk Jaminan yang diberikan antara lain :

- 1) Jaminan Kesehatan Nasional
- 2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan)

2. Tantangan Program Jaminan Sosial di Indonesia : Pekerja Informal di Indonesia

Selisih/ gap jumlah nominal kepesertaan antara pekerja di sektor formal (PPU) dengan pekerja informal (PBPU) masih sangat besar. Secara nasional, kepesertaan PPU dan khususnya PBPU, dibanding total penduduk bekerja masih jauh dari optimal. Terdapat Indikasi bahwa perlindungan sektor informal secara umum masih jauh dari optimal, dan terbatas dalam hal perlindungan hari tua. Masih banyak usaha mikro yang belum memahami Jamsos Naker, termasuk mengetahui bahwa pekerja informal bisa mendaftarkan diri dan mendapatkan perlindungan. Mayoritas pelaku usaha mikro belum merasa perlu mendaftarkan pegawainya pada program JHT dan JP, *namun* tertarik untuk mendaftarkan dirinya sendiri setelah diinformasikan lebih komprehensif.

3. Potensi Kontribusi Lulusan Jaminan Sosial

Fungsi dan Profesi :

- 1) Analisis, penyusunan regulasi, desain kebijakan
- 2) Perbaikan teknis program

- 3) Strategi perluasan dan pelaksanaan program Pelaksanaan program
- 4) Pemberdayaan dan pendampingan sosial
- 5) Konsultasi jaminan sosial
- 6) Advokasi dan sosialisasi program
- 7) Pengawasan dan Kepatuhan

PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

Pekerja sosial harus berada di bawah payung yayasan supaya perusahaan lebih percaya untuk bermitra. Karena di masa sekarang adalah bukan lagi masa untuk mencari dana tetapi mencari mitra. Selain dengan perusahaan (CSR) pekerja sosial dapat bermitra dengan mitra luar negeri atau mitra sosial seperti Kitabisa.com.

Masalah yang sering terjadi dalam bermitra:

- a. Kesalahan pola pikir kita terhadap sumber dana bantuan sosial, yang kita pikir mudah untuk mendapatkannya
- b. Sulitnya mendapat kepercayaan dari mitra, karena proposal yang diajukan tidak menarik.
- c. Masalah pelaporan penggunaan dana bantuan sosial

Penggalangan dana melalui media sosial sekarang sedang populer karena mudah dan lebih efisien dalam menyentuh haru publik asalkan proposal yang diajukan menarik. Tetapi dalam Penggalangan dana di media sosial kerap kali memperlihatkan privasi korban sasaran.

Landasan Hukum Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

- a. UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian
- b. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- d. PP No 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial
- e. PERMENSOS No 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
- f. PERMENSOS No 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam Bentuk Uang
- g. PERMENSOS No 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial
- h. Keputusan Menteri Sosial RI No. 1/huk/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban bencana
- i. Keputusan Menteri Sosial RI No 56/huk/1996 tentang pelaksanaan

pengumpulan sumbangan dari masyarakat

Sumber Penerimaan Dana Kesejahteraan Sosial dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah :

a. Penyelenggaraan Undian Gratis

Pada awal pengajuan permohonan izin undian penyelenggara undian menyetorkan dana sumbangan usaha kesejahteraan sosial (uks) pd bank BNI Cabang Kramat no. rekening : hibah langsung bentuk uang

b. Hadiah Tidak Teertebak/ tidak diambil pemenang

Bilamana dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah terdapat hadiah tdk tertebak/tdk diambil pemenang sesuai peraturan ttg undian, harus diserahkan kpd Kementerian Sosial RI, berupa uang disetor ke rekening seperti tsb di atas dan yg berbentuk barang dikelola melalui mekanisme pengelolaan BMN.

Kriteria Penerima Bantuan

1. Selektif

Bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

2. Memenuhi Persyaratan

Telah memenuhi dan sesuai dengan tata cara penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang/barang.

3. Bersifat tidak terus menerus

Pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

4. Sesuai Tujuan Penggunaan

Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial)

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. (Permensos No. 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial)

Jenis bantuan sosial:

a. Bantuan langsung: tunai, barang, makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya.

b. Penyediaan aksesibilitas: perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar, penyediaan pemakaman, dan lainnya.

Manajemen Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Membangun Jaringan
2. Identifikasi Kebutuhan Internal Organisasi
3. Merumuskan Komponen Kerjasama
4. Memetakan dan menetapkan sasaran
5. Monitoring dan evaluasi

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Dalam memproses konsep “pemberdayaan”, memerlukan sikap bersama, kritis dan selektif, kontekstual dan pemberdayaan diri serta pemberdayaan kolektif.

Pemberdayaan merupakan upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara structural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain.

- 1) Rumahtangga – memiliki kekuatan sosial, politik, dan psikologi - sebagai sumber utama pemberdayaan (Friedmann, 1992)
- 2) Pemberdayaan disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya (Robert Dahl, 1963)
- 3) Pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik lokal dan nasional (Hulme dan Turner, 1990)
- 4) Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil- hasil pembangunan” (Paul, 1987)
- 5) Perspektif Lingkungan, pemberdayaan mengacu pada penggunaan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan (Borrini, 1991; Shatty, 1991)

Pembedayaan terjadi karena adanya perubahan paragdigma yang sebelumnya pembangunan yang berfokus pada produksi (*Production Centered Development*) yang meliputi sentralisasi, mobilisasi, penaklukan, eksploitasi, hubungan fungsional, nasional, ekonomi konvensional. Menjadi pembangunan yang berfokus pada manusia (*People Centered Development*) yang meliputi desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian jejaring sosial, teritorial dan keswadayaan.

- A. Tahapan Proses Pemberdayaan
 1. Asesmen : Kebutuhan, sumber daya, individual/kelompok
 2. Perencanaan alternatif program : Melibatkan masy dalam menemukenali masalah dan cara mengatasinya, alternatif
 3. Pemformulaan rencana aksi : Penentuan tujuan jangka pendek
 4. Implementasi : Menjalankan kegiatan sesuai rencana
 5. Evaluasi : Indikator keberhasilan, relevansi, keterjangkauan, pemanfaatan, cakupan, kualitas, upaya dan efisiensi
 6. Terminasi : Kemandirian masyarakat, jangka waktu, anggaran
- B. Permasalahan dan Solusi Pemberdayaan
 1. Komunikasi dan Koordinasi : Terkait agenda pertemuan rutin sehingga dapat membuat media komunikasi bersama
 2. Kurangnya Informasi : Solusi mengumpulkan informasi terkait dan menyampaikan secara detail dengan diakhiri persamaan

persepsi

3. Kurangnya Komitmen masyarakat : bisa diinisiasikan dengan membuat kesepakatan, surat kesediaan, serta membuat ruang partisipasi dan penghargaan

4. Nilai di masyarakat yang kurang mendukung : Melakukan pendekatan persuasif serta bermitra dengan tokoh masyarakat

5. *Exit strategy & sustainability* : Membangun mindset dan komitmen masyarakat, memastikan tujuan utama tercapai

6. Birokrasi yang tidak mendukung : Menghubungi beberapa stakeholders terkait dan memberikan penjelasan pentingnya program untuk stakeholder

C. Peran dan Keterampilan

1. Fasilitator : Memberikan dukungan, membentuk konsensus, memberikan fasilitasi serta memberikan ruang pemanfaatan sumber daya, mengorganisir

2. Edukasional : Membangkitkan kesadaran masyarakat

3. Representatif : Mencari sumber daya, advokasi dan memanfaatkan media dan hubungan masyarakat

4. Teknis : Kemampuan riset, menggunakan teknologi

D. Inovasi Sosial

1. *Satisfaction Of A Need*

Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi karena cara yang tidak efisien, tidak adil atau tidak ada hasil

2. *Innovation Of The Solution*

Cara pemenuhan kebutuhan harus berbeda dengan cara tradisional

3. *Increase Of Society's Capacity To Act*

Inovasi harus mendorong pemberdayaan untuk semua, termasuk minoritas

4. *Change Of Social Structures & Relationship*

Inovasi menghasilkan transformasi dalam masyarakat melalui perubahan struktur

PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Penataan lingkungan merupakan suatu kegiatan di lingkup permukiman yang bertujuan membangun lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras, dan lestari.

Aspek dasar yang dapat mendukung konsep penataan lingkungan antara lain:

- 1) Keindahan. Lingkungan yang indah adalah dambaan setiap orang
- 2) Kenyamanan. Kenyamanan lingkungan ialah situasi lingkungan yang bersih indah dan sejuk sehingga orang merasa aman, senang, dan tenang.
- 3) Kerindangan.
- 4) Kebersihan

Lingkungan sosial adalah Keadaan sosial dan fisik langsung tempat orang menjalani kehidupan atau sesuatu terjadi atau berkembang (Bernett & Casper, 2001). Semua kondisi di dunia yang mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk pertumbuhan dan Perkembangan atau proses kehidupan yang dapat dilihat juga sebagai pemberian lingkungan bagi generasi yang lain (Stroz, 1987). Domain peksos adalah pada interaksi dan relasi antara orang dan lingkungan sosial.

Masalah lingkungan adalah masalah social juga. Pekerja social semakin mengasumsikan pentingnya memasukkan isu-isu lingkungan dalam intervensi social. Keterkaitan yang dekat Kepada isu-isu ekologi relevan khususnya ketika menangani masyarakat rentan (Rocha, 2018). Pekerjaan social yang memperhatikan aspek lingkungan diasosiasikan dengan berbagai istilah: green social work (Dominelli,, 2012), eco-social work (Peeters, 2012)

Green Social Work

Green Social Work adalah Praktek holistic fokus pada keterhubungan antar orang, organisasi sosial, relasi antara orang dan flora/fauna dalam habitatnya, dan interaksi antara krisis sosial ekonomi dan lingkungan dan perilaku antar orang yang merusak keberfungsian manusia dan bumi.

Memiliki Tujuan: mereformasi tekanan sosio-ekonomi dan politik yang telah merusak pada kualitas hidup populasi masyarakat miskin dan marjinal, menjamin perubahan dan transformasi social guna meningkatkan keberfungsian orang dan bumi hari ini dan masa depan serta meningkatkan tanggung jawab dan hak saling peduli dengan orang lain.

- A. Terdapat 3 (tiga) komponen lingkungan:
 1. Sumber daya hutan
 2. Sumber daya laut
 3. Lingkungan abiotik, tanah, air, udara dll
- B. Contoh lingkungan sosial
 1. Relasi kuasa
 2. Kesenjangan sosial
 3. Lembaga
 4. Praktek keagamaan
 5. Pasar Tenaga Kerja
 6. Pemerintah
 7. Infrastruktur

C. Permasalahan dalam lingkungan (sos-eko):

1. Relasi kuasa
2. Ketimpangan gender
3. Pasar tenaga kerja
4. Keterampilan terbatas
5. Kemiskinan
6. Kebijakan dan pelayanan publik terbatas
7. Aksesibilitas
8. Dampak krisis sos-eko
9. Intras
10. Konflik sosial
11. Kesenjangan sosial

D. Permasalahan Lingkungan Sosial (Kota Bandung, 2022)

1. Kemacetan lalu lintas
2. Sampah kota
3. Sulitnya lapangan pekerjaan
4. Kurangnya ketersediaan air bersih
5. Banjir
6. Stabilitas harga barang
7. Masalah perekonomian
8. Zonasi pendidikan
9. Tata kelola pemerintahan

PENANGGULANGAN BENCANA

Indonesia negara yang sangat rawan bencana. Dalam salah satu laporan Bank Dunia tanggal 28 Agustus 2018 disebutkan bahwa Indonesia merupakan “supermarket” bencana (the country is known as having a „supermarket“ of disaster hazards) hal itu dilandasi fakta adanya 127 gunung aktif, dan 317 kabupaten rawan banjir serta beberapa peristiwa bencana lainnya –terutama gempa yang terjadi setiap hari.

Pada tahun 2020, terjadi 2.952 kejadian bencana yang mengakibatkan 370 Jiwa korban meninggal dunia, 39 jiwa korban hilang, 536 korban luka dan sekitar 6,5 juta Jiwa menderita dan mengungsi serta 33.504 rumah rusak.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tantangan Umum dalam Penanggulangan Bencana

1. Tahap Pra Bencana

Rendahnya kesadaran masyarakat dan para pihak dalam pemahaman manajemen resiko bencana. Kenali, hindari, kurangi dan antisipasi

2. Tahap Saat Bencana

Optimalisasi kesiapan sarpas dan pemahaman SDM dalam manajemen bencana. *Safe more lives and livelihood*

3. Tahap Pasca Bencana

Keterbatasan sumber daya pemulihan. *Build back better and safer*

Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat:

- 1) Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan pemerintah saja
- 2) Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan keamanan dari bencana.
- 3) Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman bencana, karenanya kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat.
- 4) Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupannya.
- 5) Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif.
- 6) Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana

7) Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap menghadapi kondisi akibat bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Pra Bencana
 1. Situasi Tidak Ada Bencana
 - (1) Perencanaan
 - (2) Pencegahan
 - (3) Pengurangan Risiko
 - (4) Pendidikan
 - (5) Pelatihan
 - (6) Penitisan
 - (7) Penataan Tata Ruang
 2. Situasi Terdapat Potensi Bencana
 - (1) Mitigasi
 - (2) Peringatan Dini
 - (3) Kesiapsiagaan
2. Saat Tanggap Darurat
 - (1) Kaji Cepat
 - (2) Status Keadaan Darurat
 - (3) Penyelamatan dan Evakuasi
 - (4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - (5) Perlindungan
 - (6) Pemulihan
3. Pasca Bencana
 - i. Rehabilitasi
 - (1) Sosial
 - (2) Ekonomi
 - (3) Kesehatan
 - ii. Rekonstruksi
 - (1) Sarana dan Prasarana
 - (2) Kamtib
 - (3) Lingkungan

Stakeholder Penanggulangan Bencana

PB bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga urusan bersama masyarakat dan lembaga usaha., dikarenakan Dana Pemerintah terbatas bersama bencana yang datang tidak mengenal waktu. Pada hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga diberdayakan untuk kegiatan mitigasi bencana

Kemitraan dan sinergitas perlu dilaksanakan dalam upaya penanggulangan bencana yang dapat dilaksanakan dalam proses identifikasi resiko, perencanaan, pelaksanaan pencegahan-mitigasi, penanganan saat terjadi bencana hingga pemulihan pasca bencana. Kolaborasi pentahelix perlu dilakukan agar upaya penanggulangan bencana berjalan secara maksimal.

LAMPIRAN 2**DATA LAPANGAN**

Data Usulan Penerima Program Indonesia Pintar

Nama	NISN	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
ALESHA SALMA AQILA	3152597092	Bandung	2015-08-23
ELSABELA PUTRI ANJANI	3157884621	Bandung	2015-07-21
FRILIA MARWAH CANTIKA	3151531796	Bandung	2015-04-15
GHAILLAND RAFFIF ALVARO	3155048640	Bandung	2015-05-22
KHALISTA HAIFA ANNAURA	3157630493	Bandung	2015-10-02
SYAHNAZ HUMAIRA RIZALDY	3145285482	Bandung Barat	2014-12-03
ZHAFRAN ALFARIZQI	3160537533	Bandung	2016-06-15
DELISA PUTRI KUSTIAWATI	3154093330	Bandung	2015-05-14
FAKIH MUHAMMAD ZIBRAN	3163120486	Bandung	2016-06-23
GIBRAN MUHAMMAD ALFATIH	0151726353	Bandung	2015-12-10
NURAZIZAH	3159016559	Bandung	2015-10-21
RAISYA NUR FATTIN	3150748049	Bandung	2015-03-11
AL FIQRI HAIQAL RAMADHAN	3142991338	Bandung	2014-06-29
AMILA SALSABILLA	0143383390	Bandung	2014-09-04
DEA MUTIARA	0138032226	Bandung	2013-12-06
ERLIANA AGUSTIN	0149919184	Bandung	2014-08-29
FAKHRI MUHAMMAD AL FARIZI	0131001430	Jakarta	2013-12-20
IRFAN NAILUN FARID	0142358459	Bandung	2014-07-09
MUHAMAD ADITYA AGUSTIAN	0143326335	Bandung	2014-08-31
MUHAMMAD ARJUN AL HIKMAT	0142975092	Bandung	2014-09-15
MUHAMMAD GUNTUR AL HIDAYAT	0143834607	Bandung	2014-09-15
MUHAMMAD HASBY AL-AHNAF	0143437009	Bandung	2014-12-10
ZENDEN ZIDAN ALFARIZI	0137330656	Bandung	2013-11-02
AFIFAH MAISUN SHOLIHAH	0133183721	Bandung	2013-11-01
ALIFA ZAHRA OCTARIANTY	0133439360	Bandung	2013-10-10
AMZAH FAZRI KUSUMA	0134478944	Bandung	2013-09-21
BAGJA NOER RIZKI	0136117521	Garut	2013-09-22
FRISCA VERNANDA SARI	0138451092	Bandung	2013-11-04
HAFID DANNY PUTRA	0138307344	Bandung	2013-11-04
HARDI SUBAGJA	0135931598	Tasikmalaya	2013-09-06
MOCH AKBAR ADHARAYA	0133928712	Bandung	2013-10-15
MUHAMAD GIAN NASUTION	0146510970	Bandung	2014-03-03
MUHAMMAD ILYAS RAHADIAN	0133192464	Bandung	2013-07-13
NAFISYA JUAN AZAHRA	0148649275	Bandung	2014-01-19
PANESSA ANATASYA	3141943278	Bandung	2014-07-25
REHAN AGUNG LAKSANA	0133322436	Bandung	2013-10-28
REVA RIVANTO	3128283700	Bandung	2012-12-06
WAHID DANNY PUTRA	0138286615	Bandung	2013-11-04
ADELIA ZAHWA ANANDITA	3125639373	Bandung	2012-08-29
DIMAS ADITYA	0126481987	Bandung	2012-07-07
DINDA PEBRYANTI	0131367967	Bandung	2012-02-17
KINARA NASYABILA	0135214065	Bandung	2013-03-14
LULU NURFADILLAH	0121471249	Bandung	2012-10-28
MUHAMAD RAFIF SAVA ADIVKA	3127884594	Bandung	2013-07-29
MUHAMMAD HUJAAJUL AHLAM	0131560141	Bandung	2013-02-13
NATANAEL GABE AINDREA	3132957455	Garut	2013-01-23
NURUL AMANAH	0126234494	Bandung	2012-10-21

RAYA NOVIANTI	3129945782	Bandung	2012-11-06	
RIFKI HERDIANSAH	0132765712	Bandung	2013-03-23	
SILVIA APRILIANI	3139321816	Bandung	2013-04-22	
AZHARA SITI NURFADILAH	0123589570	Bandung	2012-06-16	
HUSNA AZMI FAUZIAH	0118783698	Bandung	2011-12-21	
RAZKA MUHAMAD ILHAM	0112345737	Bandung	2011-12-22	
REFAN ADITIYA FIRMANSYAH	0114307130	Bandung	2011-05-18	
REVAN WILDANSYAH	0119941273	Bandung	2011-04-16	
REZA PRATAMA PUTRA	0107213081	Garut	2010-12-05	
LETISYA VALENTINA AZHARI	0125647139	Bandung	2012-02-14	
RENDI PRATAMA	0117901874	Bandung	2011-05-09	
REZKY ADI PUTRA	0109953272	Garut	2010-12-05	
SOFA AZKIA RAMADANI	0117926585	Bandung	2011-08-03	
YAZID RIZIQ RAMADHAN	3123519058	Bandung	2012-08-12	
ADRIAN RAFA BUDIMAN	0101868712	Karawang	2010-01-29	
AIRA ANJANI	0109891848	Bandung	2010-05-19	
AURA MAHARANI	0106911856	Bandung	2010-10-16	
BILQIS NUR FEBRIYANI	0115298291	Bandung	2011-02-13	
FIRGIANE FUTRI	0108679944	Bandung	2010-10-20	
HANDIKA INSAN SIDQI LUTFILAH	0121004848	Bandung	2011-04-01	
MUCHAMAD IZZAN ALFAN SALAM	0119392412	Bandung	2011-04-05	
NAPASYA NUR FATYR	0101249175	Bandung	2010-11-30	
RADIT PRATAMA	0119630210	Bandung	2011-01-05	
RANI NOVIANI	0091609897	Bandung	2009-11-18	
RENA NOVITASARI	0093391968	Bandung	2009-11-18	
RIFAI ABDULLOH	0107581667	Subang	2010-09-14	
RISMA FAHRIDA	0106728563	Bandung	2010-03-03	
SAZKIA AL YASMIN	0105650760	Bandung	2010-11-16	

Data Pengangguran di Kelurahan Rancanumpang (2020-2021)

No.	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pengangguran - Jumlah penduduk usia kerja 15 – 56 tahun - Jumlah penduduk usia kerja 15 – 56 tahun tidak bekerja - Penduduk wanita usia 15 – 56 tahun menjadi Ibu Rumah Tangga - Jumlah penduduk usia >15 tahun yang cacat sehingga tidak bekerja	4.577 115 1.000 5	4.575 95 1.000 5
2.	Pendapatan - Pertanian - Kehutanan - Perkebunan	3.100.000.000 - -	3.300.00.000 - -
	- Peternakan - Perikanan - Perdagangan - Jasa - Penginapan/hotel/sejenis - Pariwisata - Industri rumah tangga	- - 2.500.000.000 2.000.000.000 - - 500.000.000	- - 2.800.000.000 2.250.000.000 - - 550.000.000

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI LAPANGAN



Penjajagan Awal Mahasiswa



Wawancara Informal Ketua RW



Wawancara Informal Karang Taruna



Community Meeting



Wawancara Informal Koperasi Binangkit



Kegiatan Posyandu

ELIYA PERMATASARI

2003060

**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM STUDI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**



2023